



KISAH PANCASILA

Disusun oleh:
Panitia Peringatan Hari Lahir Pancasila

Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
2017



KISAH PANCASILA

Disusun oleh:
Panitia Peringatan Hari Lahir Pancasila



Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
2017

Daftar Isi

Sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan iii

Kisah Pancasila

Pancasila di Ruang Kelas Kita 1

Inspirasi Pancasila Dalam Pengasingan 12

Lahirnya Pancasila: 1 Juni 1945 46

Pancasila: Dari Merdeka Hingga Kini..... 66

Garuda Pancasila, Akulah Pendukungmu! 83

Lampiran

Lampiran 1. Denah Tempat Duduk Selama Persidangan
BPUPKI 90

Lampiran 2. Transkripsi Pidato Soekarno pada Sidang
BPUPKI 1 Juni 1945 yang Menyebutkan soal Pancasila 91

Lampiran 3. Notulensi Pengesahan Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945 dalam Sidang PPKI 18 Agustus 1945..... 92

Lampiran 4. Rancangan Naskah Terjemahan Inggris
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945..... 94

Lampiran 5. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 95

Lampiran 6. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945..... 97

Sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan

Ketika diminta menyampaikan pandangannya mengenai dasar Indonesia Merdeka di hadapan sidang BPUPKI, Bung Karno berkata: “Kita hendak mendirikan suatu negara ‘semua buat semua’. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan kaya, tetapi ‘semua buat semua’.” Bung Karno menegaskan prinsip itu karena sebelumnya cukup sering perjuangan merebut kemerdekaan diwarnai silang pendapat di antara para pejuang yang datang dengan gagasannya sendiri-sendiri, kaum nasionalis dengan gagasan kebangsaan, kaum sosialis dengan gagasan internasionalisme, kaum santri dengan gagasan keagamaan, dan seterusnya.

Dalam pidatonya yang kemudian dikenal dengan judul “Lahirnya Pancasila”, Bung Karno menegaskan bahwa perbedaan paham itu hendaknya tidak menghalangi pembentukan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Justru seharusnya yang dilakukan adalah mencari titik temu di antara bermacam paham sehingga terbentuk kesepakatan yang bisa diterima semua pihak dan, yang paling penting, kemudian lahir landasan kehidupan bernegara yang kokoh. Itulah Pancasila. Dengan demikian Pancasila adalah konsensus dari semua elemen bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan di masa itu. Sebuah permufakatan kebangsaan yang menjadi landasan kita dalam hidup bernegara.

Amat penting bagi kita untuk mempelajari kembali lahirnya Pancasila sebagai *philosophische grondslag* atau landasan filosofis dari Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Kisah perjalanan Pancasila dari saat pertama disampaikan oleh Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945 tersebut sampai perumusan oleh Tim Sembilan pada 22 Juni 1945 dan sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945, sangat penting bagi

setiap warga negara. Buku *Kisah Pancasila* menyajikan perjalanan tersebut dalam bentuk yang ringkas dan dengan bahasa lebih populer agar lebih mudah diikuti oleh khalayak luas.

Semoga buku ini dapat berperan memperkuat rasa kebangsaan kita dan juga komitmen untuk menjaga Pancasila sebagai landasan negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Hilmar Farid
Direktur Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pancasila di Ruang Kelas Kita

Di tiap-tiap dinding ruang kelas pada hampir seluruh sekolah di Indonesia kita temukan selembar kertas yang dipigura dan digantung tinggi-tinggi bersama potret Presiden dan Wakil Presiden. Dalam selembar kertas itu, tergambar sesosok burung garuda yang gagah berwarna kuning cemerlang.

Melalui pelajaran di sekolah, kita ketahui bersama bahwa sang garuda ialah lambang negara kita. Namanya Garuda Pancasila. Apabila kita buka buku pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, akan kita temukan bahwa jumlah bulu sang garuda mencerminkan sejarah penting bangsa Indonesia. 17 helai bulu di tiap-tiap sayap, 8 helai bulu pada ekor, 19 bulu di pangkal ekor dan 45 helai bulu di leher. Kalau kita deretkan angka-angka itu, hasilnya adalah 17-8-1945. Itulah hari proklamasi kita, 17 Agustus 1945, tahun dimulainya kemerdekaan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan.

Jadi sang burung yang bernama Garuda Pancasila itu adalah perlambang dari bangsa kita seluruhnya. Kita adalah bangsa Indonesia yang merdeka sejak 17 Agustus 1945. Kita adalah burung garuda yang gagah dan cemerlang itu. Kita adalah bangsa muda yang belum lama merdeka dan dengan penuh harap menatap masa depan. Kita tidak takut berhadapan dengan dunia karena kita terdiri dari beragam etnis, agama dan pandangan hidup. Kita tidak takut bersanding dengan bangsa-bangsa lain di dunia karena kita kaya akan perbedaan. Kita berbeda-beda tapi tetap satu juga. Itulah semboyan negara kita, yang direntangkan sang garuda dalam sehelai kain putih: “Bhinneka Tunggal Ika”.

Kita adalah bangsa merdeka. Jiwa kita adalah jiwa garuda yang berani terbang melanglang buana. Keberanian itu berlandas pada apa yang ada di dada. Pada dada garuda itu, kita temukan perisai berlambangkan bintang, rantai, pohon beringin, kepala

banteng serta setangkai padi dan kapas. Lewat buku pelajaran, kita tahu bahwa lambang-lambang pada perisai sang garuda itu adalah perlambang dari dasar negara kita, lima sila dalam Pancasila:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Kalau sang garuda adalah perlambang dari bangsa Indonesia seluruhnya, maka Pancasila adalah landasan kita hidup bersama sebagai bangsa. Atas dasar Pancasila lah negara Republik Indonesia didirikan. Atas dasar Pancasila juga lah kita bersikap sebagai warga negara. Dengan bertamengkan lima lambang ini, sang garuda dengan penuh percaya diri menatap masa depan, merentangkan sayapnya lebar-lebar, siap bekerja membangun dunia baru, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur tanpa penjajahan.

Garuda Pancasila

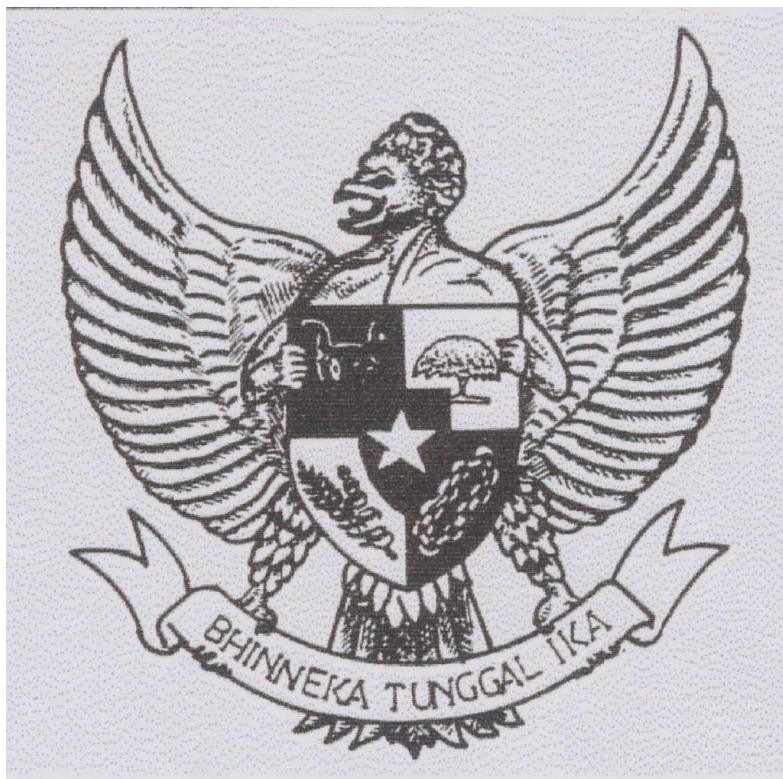
Sosok garuda dengan lima lambang pada perisainya muncul untuk pertama kalinya pada tahun 1950. Selepas pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag, 1949, dirasakan ada kebutuhan untuk menyusun lambang resmi negara. Atas dasar itu, pada awal tahun 1950 pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) menyelenggarakan sayembara desain lambang negara. Sultan Hamid II, putra sulung Sultan Pontianak ke-6, memenangkan sayembara itu.



Desain Lambang Negara Bikin Sultan Hamid II yang Menang dalam Sayembara

Desain yang ia ciptakan menghadirkan sosok garuda tunggangan suci dewa Wisnu yang mengacu pada arca dan relief di candi-candi kuno seperti Prambanan, Mendut, Penataran, Sukuh dan lain sebagainya. Sang garuda berdiri di atas tahta bunga teratai dengan dada terlindung oleh perisai. Pada perisai itu, perlambang yang digunakan berbeda dengan perlambang Pancasila yang kita kenal sekarang. Di sana, tidak ada gambar bintang dan rantai. Yang kita temukan hanya gambar keris, pohon beringin, kepala banteng dan tiga batang padi. Tidak kita temukan juga sehelai kain bertuliskan “Bhinneka Tunggal Ika”.

Setelah ditetapkan sebagai pemenang sayembara, Sultan Hamid II kemudian berdialog dengan Presiden RIS Soekarno dan Perdana Menteri RIS Mohammad Hatta. Diperbaikilah desain lambang itu dengan mencantumkan lima lambang negara yang kita kenal sekarang. Selain itu, ditambahkan juga helai kain bertuliskan “Bhinneka Tunggal Ika”. Sang garuda kini digambarkan memiliki sepasang tangan yang memegang erat-erat perisai Pancasila.



Desain Garuda yang Diperbaiki Sultan Hamid II

Kemudian setelah mendapat beberapa masukan, desain itu diperbaiki lagi. Kali ini gambar tangan garuda itu dihilangkan dan

penggambaran kepalanya diperbaiki. Pada sebuah acara di Hotel Des Indes, Jakarta, di tanggal 15 Februari 1950 Soekarno memperkenalkan desain itu pada masyarakat.



Desain Garuda yang Telah Diperbaiki dan Diumumkan pada 15 Februari 1950

Namun lambang itu dirasa kurang cukup. Penggambaran kepala elang itu kurang mencerminkan kekhasan burung garuda dalam cerita-cerita rakyat yang berkembang di Nusantara, masih tercium kesan seperti kepala burung elang botak yang menjadi lambang negara Amerika Serikat. Maka ditambahkan jambul di depan dan belakang kepala garuda. Kemudian Soekarno meminta kepada Dullah, pelukis istana, untuk menggambar ulang desain bikinan Sultan Hamid II itu dengan mengubah posisi cakar yang semula mencengkeram dari belakang helai kain menjadi nampak dari depan helai kain.



Desain yang Telah Diperbaiki Dullah dan Sultan Hamid II serta
Disahkan pada bulan Maret 1950

Lantas Sultan Hamid II menjalankan penyelerasan akhir atas desainnya dengan memperbaiki tata warna dan skala. Versi terakhir inilah yang kemudian dijadikan sebuah patung perunggu berlapis emas yang ditempatkan di Ruang Kemerdekaan Museum Nasional dan dijadikan acuan resmi Garuda Pancasila sebagai lambang negara sampai sekarang. Inilah asal-usul gambar yang ada di ruang kelas kita hari ini.



Patung Garuda Pancasila di Ruang Kemerdekaan Museum Nasional

Tapi dari mana Pancasila berasal? Kenapa ada lima jumlah sila di dalamnya? Kenapa tidak tujuh, atau dua belas, atau seratus lima belas? Apa hubungan di antara lima sila itu? Lantas kenapa

pula Pancasila dijadikan dasar negara? Apa itu dasar negara? Kenapa Pancasila ada di ruang kelas kita?

Asal-Usul Pancasila

Apabila Garuda yang jadi lambang negara kita berasal dari tahun 1950, Pancasila punya riwayat yang jauh lebih panjang. Pada tahun 1945, para pendiri bangsa telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Lima sila itu adalah landasan tempat kita berpijak dalam segala hal yang berhubungan dengan hidup bernegara. Setiap warga negara tentu merdeka untuk mengutarakan pikiran dan pendapatnya sendiri. Akan tetapi, kalau sudah menyangkut persoalan bernegara dan hidup bersama sebagai anggota dari negara, maka kita wajib berpedoman pada Pancasila. Semua aturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah harus bisa dirunut asal-muasalnya dalam semangat kelima sila dalam Pancasila. Itulah maksudnya Pancasila sebagai dasar negara.

Walaupun baru dicetuskan pada tahun 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan ditetapkan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Pancasila sebetulnya sudah berlaku dalam praktik sehari-hari masyarakat Indonesia. Soekarno tidak mengarang bebas waktu ia mencetuskan Pancasila pada sidang BPUPKI. Ia tidak mereka-reka Pancasila dari angan-angannya sendiri.

Dalam mencetuskan Pancasila, Sang Proklamator merangkum pengalaman berjuang bangsa Indonesia melawan penjajahan. Ia membaca sejarah bangsa kita yang hidup sengsara di bawah penjajahan Belanda. Ia mempelajari bagaimana rakyat Indonesia ditindas oleh para priyayi setempat yang mengabdikan Belanda. Ia menyelidiki sebab-sebab kenapa penjajahan bisa menimpa bangsa Indonesia. Kemudian Soekarno memperhatikan juga usaha-usaha mandiri bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Ia menyaksikan sendiri

gelora rakyat banyak yang dengan penuh keberanian melakukan perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan. Ia belajar dari pengalaman bangsa Indonesia sejak awal abad ke-20 yang mau membangun tatanan masyarakat adil dan makmur, merdeka dari segala macam penindasan. Dari sanalah kemudian Soekarno, pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945, mencetuskan Pancasila sebagai landasan negara kita. Pancasila adalah saripati dari perjuangan melawan kolonialisme dan perjuangan membangun Negara Indonesia Merdeka.

Oleh karena itu, membaca kisah Pancasila adalah membaca kisah perjuangan rakyat menghancurkan kolonialisme Belanda dan membangun Negara Indonesia Merdeka. Perlawanan terhadap penjajahan telah meletus di berbagai daerah sepanjang kepulauan Nusantara. Di Aceh kita punya Cut Nyak Dhien dan Cut Nyak Meutia, dua perempuan gagah berani yang mengorbankan nyawa demi mengusir penjajah. Di Ambon, kita punya Martha Christina Tiahahu yang berontak terhadap penindasan Belanda atas masyarakat Maluku. Di Jawa, kita punya Nyi Ageng Serang, perempuan cerdas ahli siasat perang gerilya kepercayaan Pangeran Diponegoro, yang gigih melawan penyerobotan tanah yang dilakukan penjajah Belanda. Di Kalimantan, kita punya Pangeran Antasari bertempur melawan Belanda di sepanjang sungai Barito. Di Sulawesi, kita punya Pong Tiku, seorang gerilyawan piawai yang tak henti-hentinya membuat penjajah kesulitan menampakan kaki di Tana Toraja.

Dari abad ke-17 sampai dengan abad ke-19, pengorbanan para pahlawan kita tak berhasil mengusir penjajah Belanda. Apa sebabnya? Tak lain karena perjuangan kita terpecah-pecah, dijalankan sendiri-sendiri pada tiap-tiap wilayah. Setiap pahlawan berjuang untuk masyarakat di daerahnya. Mereka belum mengikatkan diri dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Mereka belum berjuang sebagai bangsa Indonesia yang satu. Penjajah Belanda menuai keuntungan dari kondisi masyarakat Nusantara yang terpecah belah. Bahkan tak jarang pula mereka

memanfaatkan perbedaan itu demi menyulut perpecahan di antara masyarakat Nusantara sendiri. Agar masyarakat Nusantara tidak bersatu melawan Belanda, maka penjajah menanamkan ketidaksukaan antar daerah, prasangka antar etnis, kecurigaan antar pemeluk agama di Nusantara. Sebab mereka tahu, penjajahan hanya bisa langgeng kalau masyarakat yang terjajah itu terus terpecah-belah.

Politik pecah-belah atau adu-domba inilah yang perlahan-lahan disadari oleh rakyat Indonesia. Di awal abad ke-20, dengan tumbuhnya surat kabar yang diusahakan dan dikelola oleh bangsa Indonesia sendiri muncullah kesadaran persatuan sebagai bangsa. Muncullah kesadaran bahwa orang Jawa, orang Batak, orang Minang, orang Bone, orang Maluku, orang Flores, peranakan Arab, peranakan Tionghoa, semua etnis dari berbagai daerah di Nusantara itu sama-sama dijajah. Walaupun mereka berbeda-beda, tapi mereka tetap satu sebagai bangsa yang dijajah oleh Belanda. Oleh karena itu, perlawanan terhadap kolonialisme pun hanya akan berhasil apabila dilangsungkan sebagai suatu kesatuan tenaga, sebagai satu bangsa yang meronta dan berontak ingin merdeka. Maka lahirlah bangsa Indonesia, burung garuda yang gagah dan cemerlang itu.

Maka bangun dan berdirilah bangsa Indonesia! Kita bangsa Indonesia terlahir dari etnis, agama dan pandangan hidup yang berbeda, tetapi dipersatukan oleh nasib penjajahan yang sama dan oleh karena itu dipersatukan pula oleh api rasa merdeka yang sama. Kita berbeda-beda tapi tetap satu bangsa merdeka. Dengan begitu, bergulirlah perjuangan rakyat Nusantara sebagai bangsa Indonesia pada awal abad ke-20. Orang-orang membangun partai tidak lagi atas dasar etnis, agama dan kewilayahan, tetapi atas dasar keinginan bersama untuk merdeka.

Atas desakan zaman yang mewujudkan dalam perlawanan rakyat di mana-mana, muncullah para pemimpin pergerakan kebangsaan. Dibentuklah *Indische Partij* sebagai partai politik pertama di Indonesia pada 25 Desember 1912 oleh Douwes Dekker,

Ki Hadjar Dewantara, dan Tjipto Mangoenkoesoemo. Mereka ditangkap dan dibuang karena mengkritik pemerintah Belanda. Kemudian tumbuh partai-partai lain yang ditanggapi dengan keras oleh pemerintah kolonial. Sebagian dibubarkan, anggotanya diasingkan, bahkan dibunuh dan dianiaya. Di tengah gelora itu, tampillah Soekarno memimpin Partai Nasional Indonesia yang mencita-citakan kemerdekaan Indonesia. Ia berulang-kali ditangkap, dijebloskan ke penjara dan diasingkan ke berbagai daerah di sepanjang Nusantara. Tapi ia tetap teguh memimpin perjuangan bangsa Indonesia ke arah kemerdekaan. Di tengah hiruk-pikuk perjuangan nasional itulah ia mencetuskan Pancasila sebagai intisari perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka.

Kisah Pancasila adalah kisah perlawanan rakyat untuk menggantikan tatanan masyarakat terjajah dengan tatanan masyarakat merdeka. Kisah Pancasila adalah kisah bangsa merdeka. Inilah kisah yang belum selesai hingga kini.

Kisah Pancasila adalah kisah kita semua.

Inspirasi Pancasila Dalam Pengasingan

Menuju Ende

Pada 1934, Bung Karno beserta keluarga—istrinya Inggit Garnasih, anak angkatnya Ratna Djuami, serta mertuanya Ibu Amsi—naik kapal Van Riebeeck menuju tempat pembuangannya, Kota Ende, Flores. Sekarang, kota ini termasuk dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jika sekali waktu berkunjung ke Pulau Flores, khususnya Kota Ende, sempatkanlah diri mengunjungi rumah pengasingan Bung Karno di sana yang masih dijaga dengan tekun oleh masyarakat setempat. Letaknya di Jalan Perwira Nusa Tenggara Timur. Di dalam rumah kecil sederhana itu, masih tersimpan dengan baik barang-barang peninggalan Bung Karno seperti foto keluarga, pena serta perabotan rumah yang dipakai Bung Karno beserta keluarga saat itu.

Di kota itu juga kita bisa mendatangi tempat di mana Bung Karno pernah menghabiskan berjam-jam untuk merenungkan masalah kebangsaan Indonesia. Di tengah cuaca tropis Kota Ende, di bawah sebuah pohon sukun yang bercabang lima, Soekarno kerap duduk dan merenung perihal perjuangan kemerdekaan serta kebangsaan Indonesia yang dicita-citakannya. Pohon sukun yang asli kini sudah tiada karena tumbang oleh angin. Kini, pohon itu diganti dengan pohon sukun baru yang ditanam sejak 17 Agustus 1981 tepat pukul 9 pagi, dalam suatu upacara yang dihadiri oleh sekitar 40 teman Soekarno yang pernah mendampingi selama pengasingan di Ende. Lokasi itu kini dilestarikan dan diberi nama Taman Pancasila. Ada sebuah patung Bung Karno, karya perupa Hanafi, yang tampak sedang duduk merenung menatap ombak Laut Sawu yang berdebur di depannya. Hanafi menulis dengan puitis pencariannya perihal sosok Bung Karno ketika hendak membuat patung itu,

“Mendengar cerita yang berulang-ulang, Soekarno sering duduk menatap laut di depan taman itu setiap pukul tiga sore sampai Maghrib. Ia akan pulang bersama ombak lautan memasuki kegelapan. Kegelapan telah memisahkan penglihatan dan pendengaran, suara ombak itu tidak terkurung lagi dalam penjara penglihatan. Lalu ia ingin menyamakan suara ombak yang tak pernah selesai di telinganya dengan semangat perjuangan yang tak boleh berakhir...”

Tempat pembuangan atau tempat pengasingan merupakan istilah yang akan sering kita temui ketika membaca sejarah perjuangan Indonesia di masa penjajahan Belanda (era 1900an-1940an). Ketika itu, para Pendiri Bangsa kita kerap mengkritik dan melawan Pemerintah Kolonial Belanda. Kritik-kritik itu dikumandangkan mereka melalui tulisan, pidato-pidato di muka umum, aksi-aksi berkumpul bersama rakyat, maupun protes langsung—berupa surat terbuka ataupun telegram—kepada Pemerintah Kolonial Belanda. Hampir semua Pendiri Bangsa kita pernah mengalami masa pembuangan dan pengasingan ini. Tidak tanggung-tanggung, ada yang dibuang dan diasingkan jauh ke luar negeri, ada yang dibuang dan diasingkan jauh dari kota-kota tempat mereka menjalankan aktivitas politiknya.

Sebut saja misalnya “Tiga Serangkai” yang terdiri dari E.F.E. Douwes Dekker, Tjipto Mangoenkoesoemo, dan Ki Hadjar Dewantara. Ketiganya pernah dibuang ke kota-kota yang jauh dari Bandung, kota tempat mereka menjalankan aktivitas politik. Kupang, Banda, bahkan Suriname adalah beberapa saja dari tempat-tempat yang mereka diasingkan lantaran melawan penjajah Belanda. Douwes Dekker adalah seorang peranakan Indo-Belanda yang sangat gigih hingga akhir hayatnya melawan penjajahan Belanda dan mengkritik dengan keras kebijakan-kebijakan Belanda yang merugikan rakyat Indonesia.

Ada juga pejuang kita yang tak kuat berada di pengasingan hingga akhirnya menghembuskan nyawanya di sana. Nasib buruk ini menimpa misalnya Marco Kartodikromo, seorang wartawan dan penulis yang begitu gigih melawan penjajah Belanda. Akibat aktivitas perlawanannya, ia kerap kali dipenjarakan dan dibuang. Terakhir, pada 1926, ia diasingkan di Boven Digoel, Papua. Oleh karena penyakit malaria yang dideritanya di tempat itu, ia pun meninggal pada 1932.

Bayangkanlah masa-masa itu. Untuk berkomunikasi sangatlah sulit. Telepon, apalagi internet, belumlah ada. Untuk berkomunikasi jarak jauh, orang-orang di masa itu hanya mengandalkan surat-menyurat dan telegram. Telegram pun sangatlah mahal dan terbatas di kota-kota besar saja. Sehingga, satu-satunya komunikasi yang lumrah adalah surat. Dengan begitu, kita bisa bayangkan, bagaimana hukuman dibuang ke pengasingan merupakan hukuman yang berat bagi para pejuang kemerdekaan masa itu. Dengan dibuang dan tinggal di tempat yang jauh dari kota-kota tempat mereka beraktivitas, otomatis mereka tak punya keleluasaan untuk berkomunikasi dengan kawan-kawan seperjuangan. Tentu saja komunikasi antara sesama pejuang sangatlah penting. Selain sekadar mengetahui kabar masing-masing, mereka pun butuh berbagi informasi perihal apa-apa saja yang dilakukan pihak musuh, dalam hal ini pemerintah kolonial Belanda. Strategi dan cara perjuangan pun menjadi bahan perbincangan mereka seandainya bisa berkomunikasi dengan leluasa. Hukuman dibuang ke pengasingan bagaikan membiarkan si pejuang itu tetap hidup, tetapi tangan dan kakinya terikat. Dengan kata lain, ia tetap dibiarkan hidup tetapi kemungkinan-kemungkinan perjuangannya ditiadakan.

Bagaimana ceritanya hingga Bung Karno bisa diasingkan ke Ende? Untuk mengetahui latar belakang itu, kita mesti menengok jauh ke belakang, di masa-masa ketika Bung Karno masih bersekolah di HBS (Hoogere Burger School), semacam sekolah lanjutan, di Surabaya. Di Surabaya, ayah Soekarno

menitipkannya pada seorang tokoh pejuang kemerdekaan yang sangat terkenal, HOS Tjokroaminoto, seorang pendiri Sarekat Islam yang kala itu dikenal sebagai Singa Podium. Tjokroaminoto pada masanya adalah seorang penentang pemerintahan Belanda yang sangat gigih. Ia terkenal sebagai orang yang mampu menyuarakan keinginan dan perasaan hati masyarakat Indonesia yang tertindas oleh Penjajahan Belanda. Bung Karno pun selama bersekolah di HBS tinggal di rumah Tjokroaminoto.

Pada saat itu, sekolah tidaklah sebanyak sekarang. Hanya di kota-kota besar saja kita bisa menemukan sekolah. Sekolah ini pun merupakan sekolah buatan pemerintah kolonial Belanda. Sehingga, seringnya di sekolah-sekolah ini terjadi diskriminasi terhadap murid-murid Indonesia oleh guru-guru mereka yang berasal dari Belanda. Sedikitnya jumlah sekolah mengakibatkan tidak semua orang Indonesia bisa bersekolah. Hanya segelintir saja yang punya kesempatan itu. Dengan bersekolah secara giat dan tekun serta membaca banyak buku, murid-murid sekolah kala itu tahu bahwa mereka sebenarnya dijajah oleh Belanda.

Namun, jangan dikira semua anak Indonesia yang bersekolah saat itu sadar betul bahwa mereka dijajah dan punya semangat untuk berjuang ke luar dari penjajahan itu. Hanya segelintir kecil saja dari mereka yang cukup berani dan punya mental bajalah yang berani memberontak. Pertama-tama, mereka memberontak pada kebiasaan dan kurikulum sekolah Belanda yang diskriminatif, lantas di kemudian hari mereka memberontak pada pemerintahan kolonial Belanda itu sendiri. Anak-anak sekolah yang lainnya kala itu, kurang berani bahkan bisa dikatakan pengecut dan lebih berkompromi dengan Belanda. Mereka ini setelah lulus justru bekerja untuk pemerintahan kolonial. Kemerdekaan Indonesia yang sekarang kita rasakan sebenarnya berhutang pada anak-anak sekolah saat itu yang berani memberontak.

Akibat sekolah yang jumlahnya terbatas dan hanya ada di kota-kota besar saja, anak-anak dari daerah yang tidak punya

sekolah, terpaksa harus tinggal indekos atau di asrama. Itulah sebabnya Bung Karno tinggal indekos di rumah Tjokroaminoto tadi. Di indekosnya Tjokro, Bung Karno bertemu dan berteman akrab dengan sesama anak sekolah lainnya seperti Semaoen, Alimin, Darsono, Tan Malaka, Musso, hingga Agoes Salim. Rumah bersejarah itu terletak di Jalan Peneleh 7 no. 29-31, Surabaya. Mampirlah ke sana jika berkunjung ke Surabaya.

Di rumah milik Tjokroaminoto inilah Bung Karno muda kerap berdiskusi, berbagi pemikiran, dengan kawan-kawannya sesama penghuni asrama itu. Apalagi, si tuan rumah, Tjokroaminoto, memang seorang politisi yang sangat keras menentang pemerintah kolonial. Ia menjadi semacam mentor untuk para anak muda ini. Dari sinilah, sejak dini, semangat perlawanan terhadap kolonialisme serta kepekaan Bung Karno atas penderitaan rakyat mulai berkembang. Setali tiga uang dengannya, kawan-kawannya sesama penghuni asrama Tjokroaminoto pun demikian. Mereka-mereka nantinya menjadi pejuang kemerdekaan Indonesia yang gigih dengan cara dan pandangan politiknya masing-masing. Namun yang terpenting, mereka terus bahu membahu bersama-sama di dalam perjuangan. Meski perbedaan pendapat di sana sini kerap pula terjadi, sebagaimana biasanya terjadi dalam setiap persahabatan.

Lewat pergaulan itu juga Bung Karno mulai menaruh perhatian dan akhirnya rasa kagum pada cara berpidato Tjokroaminoto. Ia mulai belajar teknik-teknik berpidato bapak kosnya ini. Lebih dari itu, ia pun berhasil menemukan gaya berpidatonya yang khas. Pada sebuah kesempatan, Bung Karno sempat mempraktekkan kemampuannya. Ketika itu Tjokroaminoto berhalangan hadir dan Bung Karno diminta untuk berpidato menggantikannya. Pada masa itu, Bung Karno tidak sekadar tertarik dengan perjuangan kemerdekaan melalui politik. Ia sudah beraksi dengan misalnya masuk sebagai anggota organisasi Tri Koro Darmo yang nantinya diubah namanya menjadi Jong Java. Di sini, Bung Karno mulai belajar berorganisasi

dan pergaulannya dengan sesama pejuang kemerdekaan pun semakin meluas. Semua pengalamannya selama di Surabaya tentu membentuk jiwa dan semangat berjuang Bung Karno yang terus dibawanya di dalam langkah-langkah perjuangannya lebih lanjut.

Selepas lulus dari HBS di Surabaya (1921), Bung Karno pindah ke Bandung untuk melanjutkan pendidikannya di bidang teknik. Di kota ini, ia sempat tinggal di kediaman Haji Sanoesi, anggota Sarekat Islam dan sahabat karib Tjokroaminoto. Haji Sanoesi lantas mengenalkannya dengan Ki Hadjar Dewantara, Tjipto Mangoenkoesoemo dan Dr. Douwes Dekker, yang saat itu merupakan pemimpin nasional Indische Partij. Pindah ke kota yang lain dan berpisah dengan sebagian besar kawan-kawannya, bukan berarti memadamkan semangat perjuangan Bung Karno. Semangatnya justru makin berkobar. Apalagi kawan-kawannya semasa di Surabaya pun sudah berpencar juga ke beberapa kota di Jawa dan terus melanjutkan perjuangan.

Bung Karno lantas menjadi mahasiswa Jurusan Arsitektur di Technische Hogeschool, cikal bakal Institut Teknologi Bandung saat ini. Meskipun aktif dalam perjuangan dan konsisten menentang penjajah Belanda, Bung Karno bukanlah jenis mahasiswa yang lupa akan kewajibannya di bangku kuliah. Buktinya, pada 25 Mei 1926 ia dipromosikan sebagai *Ingenieur* dan pada 3 Juli 1926 ia termasuk satu dari empat insinyur pertama bangsa Indonesia. Bung Karno terkenang betul nasihat presiden universitas ketika ia lulus,

“...Ir. Soekarno, ijazah ini dapat robek dan hancur menjadi abu di satu saat. Ia tidak kekal. Ingatlah, bahwa satu-satunya kekuatan yang bisa hidup terus dan kekal adalah karakter dari seseorang. Ia akan tetap hidup dalam hati rakyat, sekalipun sesudah mati.”

Satu tahun sebelum lulus, Bung Karno bersama kawan-kawannya mendirikan *Algemeene Studieclub* (Kelompok Belajar Umum) di kalangan mahasiswa Bandung. Tidak tanggung-tanggung, kelompok belajar ini bersifat politis dan bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Sesungguhnya, *Algemeene Studieclub* ini terinspirasi dari sebuah *studieclub* lainnya yakni *Indonesische Studieclub* yang didirikan dr. Sutomo di Surabaya. Di dalam *studieclub* ini kerap diadakan diskusi-diskusi politik yang banyak menyumbangkan dasar-dasar pemikiran Bung Karno serta dasar-dasar pemikiran menuju Indonesia Merdeka. Persatuan Nasional adalah salah satu kesimpulan penting yang pernah didapatkan melalui diskusi-diskusi di dalam kelompok ini. Buah pikiran dari kelompok studi ini menjadi bahan tulisan-tulisan serta pidato-pidato Bung Karno. Kelompok studi ini bersama *Indonesische Studieclub* lantas menerbitkan majalah *Soeloeh Indonesia Moeda* sebagai corong pemikiran mereka. Di media ini, Bung Karno rajin menulis.



Soekarno di Masa Kelompok Studi

Ketika itu, kalangan perjuangan menuju Indonesia Merdeka tengah terpecah-belah. Hal ini diakibatkan oleh adanya

kelompok perjuangan kemerdekaan Indonesia lainnya yang mengadakan pemberontakan bersenjata kepada Belanda di tahun-tahun sekitar itu. Organisasi pemberontak inipun dilarang oleh Belanda. Tentu saja peristiwa ini cukup berpengaruh pada kalangan pejuang kemerdekaan lainnya. Di saat itu para pejuang kemerdekaan memang datang dari latar belakang pandangan politik yang berbeda-beda. Ada yang nasionalis, Islamis, Kristen maupun sosialis. Bung Karno dan kawan-kawannya di *Algemeene Studieclub*, melalui tulisan-tulisan mereka di *Soeloeh Indonesia Moeda*, mencapai kesimpulan bahwa perlu ada persatuan di dalam perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Nasionalisme harus menjadi yang terdepan dan ideologi atau pandangan politik dari masing-masing kelompok pejuang harus diabdikan bagi cita-cita kebangsaan itu.

Merasa bahwa *Algemeene Studieclub* tidak cukup, pada 4 Juli 1927, Bung Karno dan kawan-kawannya (Tjipto Mangoenkoesoemo, Anwari, Sartono, Boediarto, dan Samsi) mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia yang nantinya berubah nama menjadi Partai Nasional Indonesia (PNI). Partai ini adalah partai pertama yang secara tegas menyatakan berjuang dengan cara non-kooperatif dan mengandalkan pengorganisasian massa. Non-kooperatif artinya tidak mau bekerja sama dengan belanda dan pengorganisasian massa artinya mengumpulkan massa yang setuju dengan kemerdekaan Indonesia sebanyak-banyaknya. Partai Nasional Indonesia, dengan demikian, adalah partai yang tidak berdasarkan sekelompok elit semata melainkan berdasarkan masyarakat kebanyakan. PNI juga mencita-citakan kemerdekaan politik Indonesia serta mengimajinasikan kewilayahan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Sangihe Talaud sampai Rote yang merupakan keseluruhan wilayah kekuasaan Belanda saat itu. PNI menerbitkan surat kabar *Fikiran Rak'jat* sebagai corong mereka. Bung Karno aktif di media ini sebagai redaktur dan penulis.

Kemunculan PNI tepat pada waktunya. Pasalnya, selain masalah perjuangan bersenjata yang dilakukan kaum pejuang kemerdekaan yang berhaluan sosialis, Sarekat Islam pun perlahan-lahan mulai meredup di kancah perlawanan terhadap Belanda. Tawaran persatuan nasional yang diusung Bung Karno dan PNI-nya seperti oase di tengah ketandusan. Dukungan dari pelbagai pihak yang setuju dengan ide persatuan ini pun berdatangan. PNI bisa dikatakan menjadi yang terdepan di dalam perjuangan melawan penjajah Belanda saat itu. Kaum pejuang Islam dan kaum pejuang sosialis setuju dan tersadar bahwa yang terpenting adalah persatuan nasional dan yang harus mereka utamakan adalah nasionalisme dan bukan ideologi ataupun agama masing-masing. Hanya dengan cara bersatu dan mementingkan nasionalisme seperti itulah penjajah Belanda mungkin dikalahkan. Dengan demikian, bukan cuma kecemerlangan ide persatuan nasional saja yang terpenting; lebih dari itu, ide persatuan nasional ini memang merupakan kebutuhan saat itu demi kemerdekaan bersama. Pada akhir 1929, PNI berhasil mencapai jumlah keanggotaan 10.000 orang.

Ide persatuan nasional ini semakin tampak hasilnya ketika pada 1928, atas prakarsa PNI dibentuklah PPPKI (Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia). Dalam rangka menyambut kongres pertama PPPKI ini, Bung Karno menulis demikian,

“dan tiap-tiap perbuatan-bersama, tiap-tiap fi’il yang terjadi dengan pekerjaan-bersama, adalah suatu langkah ke arah kekuasaan itu. Baik soal perguruan, mau pun soal bank, ... atau soal apapun juga... perhatiannya semua soal itu dengan perhatian-bersama dan mengerjakan semua soal itu dengan pekerjaan bersama, adalah berarti penambahan kekuasaan kita—penambahan kekuasaan kita ke luar, dan penambahan kekuasaan kita ke dalam.”

Jelas dari apa yang ditulis Bung Karno ini bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia itu tidak bisa tidak merupakan buah dari gotong-royong, merupakan buah dari kerja bersama dari setiap kalangan anak negeri Indonesia. Begitu pula, tanpa gotong-royong dan kerja bersama dari setiap kalangan, mustahil kemerdekaan Indonesia itu bisa diraih.

Di tengah kesibukannya sebagai politisi dan arsitek, Bung Karno masih sempat meluangkan dirinya untuk berbagi ilmu. Ketika Bung Karno lulus dari sekolah arsitekturnya, Tiga Serangkai (E.F.E. Douwes Dekker, Tjipto Mangoenkoesoemo, dan Ki Hadjar Dewantara) baru saja menyelesaikan masa pengasingan mereka di negeri Belanda. Sepulangnya dari sana, mereka sepakat bahwa selain berjuang di bidang politik, mereka juga harus berjuang di bidang pendidikan. Masyarakat Indonesia harus ke luar dari kebodohan agar bisa lebih teguh melawan penjajahan.

Pada masa itu, kurikulum di sekolah-sekolah milik Belanda mengajarkan anak-anak Indonesia untuk tunduk pada pemerintah Belanda. Tiga Serangkai ingin membuat sekolah yang kurikulumnya sepenuhnya berpihak pada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ki Hadjar Dewantara lantas membangun sekolah Taman Siswa di Yogyakarta dan Douwes Dekker membangun Sekolah Ksatrian (Ksatrian Institut) di Bandung. Bung Karno pun sempat menjadi pengajar di Ksatrian Institut ini pada 1926. Di gerbang sekolah itu tertulis motto demikian: *Door de will van onse Volk* (Karena Kemauan Rakyat) dan *Des Volte Toekomst gewijd* (Diabdikan untuk Hari Depan Rakyat).

Namanya perjuangan tentu saja tidak sepenuhnya berjalan dengan mulus. Aktivitas PNI rupanya meresahkan pihak pemerintah kolonial. Akibatnya, Bung Karno dan para pimpinan PNI yang lain (Maskoen, Soepriadinata, dan Gatot Mangkoepradja) ditangkap pada 29 Desember 1929 se usai menghadiri rapat umum PPKI di Yogyakarta. Bung Karno lantas menyiapkan pledoi atau pidato pembelaannya sebelum dihadapkan di muka pengadilan.

Pledoinya di depan pengadilan itu menjadi salah satu naskah paling penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pledoi panjang itu ditulisnya dari dalam penjara Banceu, Bandung, di selnya yang sangat sempit. Tidak ada meja dan kursi yang bisa dipakai untuk menulis. Dalam sel itu hanya ada kasur kecil dan kaleng rombeng untuk kencing dan buang air besar setinggi 60 cm dan lebar 60 cm. Kaleng yang berbau tidak sedap itu dimanfaatkan Bung Karno sebagai alas untuk menulis *Indonesia Menggugat* yang panjang itu. Demikian Bung Karno mengenang keadaan ketika ia membaca pledoi yang susah payah ditulisnya itu,

“ketika aku memulai pidatoku tiada satu pun terdengar suara. Tiada satu pun yang bergerak. Tiada gemerisik. Hanya putaran lembut dari kipas angin di atas kepala terdengar merintih. Sambil berdiri di atas bangku pesakitan yang ditinggikan aku menghadap ke meja hijau hakim dan aku mulai berbicara. Aku berbicara berjam-jam.”

Betapa tidak. *Indonesia Menggugat* bukanlah pembelaan atas Bung Karno seorang yang dipenjarakan pemerintah kolonial. Lebih dari itu, naskah itu merupakan pembelaan Bung Karno atas seluruh bangsa Indonesia yang selama ini dijatuhkan harkat dan martabanya oleh penjajahan Belanda.

Dalam *Indonesia Menggugat*, Bung Karno memaparkan betapa bangsa Indonesia bertahun-tahun disiksa dengan kejam oleh kolonialisme. Dimulai dari kekejaman-kekejaman pemerasan atas jiwa dan raga bangsa Indonesia oleh Kompeni (VOC) hingga berpindah tangan ke Kerajaan Belanda. Bung Karno menyebutnya sebagai kolonialisme lama. Tetapi bukan berarti setelah itu kaum nasionalis Indonesia melupakan penderitaan rakyat Indonesia yang ditimbulkan oleh kolonialisme itu. Demikian dikatakannya,

“Tuan-tuan Hakim yang terhormat!, Oost Indische Compagnie mengkocar-kacirkan rumah tangga Indonesia, *Cultuur stelsel* mengkocar-kacirkan rumah tangga Indonesia. Tuan-tuan barangkali bisa juga lantas mempunyai pikiran: “benar V.O.C. dan *Cultuur stelsel* jahat, benar V.O.C. dan *Cultuur stelsel* ada suatu bencana bagi rakyat Indonesia, benar V.O.C. dan *Cultuur stelsel* memasukkan rakyat Indonesia di dalam kesengsaraan dan kehinaan, tetapi buat apa membongkar-bongkar hal-hal yang sudah kuno?” Betul Tuan-tuan Hakim, kejahatan V.O.C. dan kejahatan *Cultuur stelsel* adalah kejahatan kuno, tetapi hati nasional tak gampanglah melupakannya.”

Perjuangan kemerdekaan Indonesia oleh kaum nasionalis yang dipimpin Bung Karno berangkat dari hal ini: perasaan betapa Indonesia begitu lama sudah diporak-porandakan oleh penjajahan.

Bung Karno tidaklah silau dengan kemajuan-kemajuan akibat dari modernisasi yang dibawa oleh pemerintah kolonial. Ia melihatnya dengan kritis dan justru membalikkan matanya pada kesengsaraan rakyat di Indonesia yang begitu nyata diakibatkan oleh penjajahan Belanda. Demikian ia menulis,

“Dan toh, tidak kuranglah orang-orang pandai bangsa Belanda pula yang menunjukkan kesengsaraan ini di dalam buku-buku, artikel-artikel atau pidato-pidato,—tidak kuranglah kaum terpelajar bangsa kulit putih yang mengakuinya! Kesengsaraan rakyat Indonesia haruslah diakui oleh siapa saja yang mau menyelidikinya dengan hati yang bersih; kesengsaraan rakyat itu bukan ‘omong kosong’ atau ‘hasutannya kaum pengasut’. Kesengsaraan itu adalah suatu kenyataan atau realiteit yang gampang dibuktikan dengan angka-angka.”

Di dalam *Indonesia Menggugat* jelaslah terlihat bahwa Bung Karno, mewakili seluruh rakyat Indonesia, mengkritik penjajahan yang entah dengan cara yang lama maupun cara yang baru tetap saja menyengsarakan rakyat Indonesia. Kesengsaraan rakyat itu bukanlah isapan jempol semata, tetapi memang nyata dan harus diakui oleh siapa pun yang mau melihatnya dengan mata kemanusiaan yang jujur. Oleh karenanya, upaya menuju Indonesia merdeka adalah upaya untuk menyudahi kesengsaraan rakyat itu, sebuah upaya untuk memeratakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada akhirnya, Bung Karno dan kawan-kawan dijebloskan selama empat tahun di penjara Sukamiskin, Bandung. Namun, didorong pula oleh pledoi yang begitu jernih dan benar-benar menggugah tidak hanya mereka yang hadir di pengadilan tetapi hampir seluruh dunia—karena naskah ini lantas menjadi kajian bagi hampir semua negeri di Eropa kala itu—masa tahanan pun dipotong menjadi hanya dua tahun saja. Mereka bebas pada 31 Desember 1931.

PNI lantas dibubarkan dan dibentuklah Partindo pada 25 April 1931. Pembubaran PNI ini lantaran pemerintah kolonial mencapnya sebagai partai terlarang. Maka, Partindo didirikan sebagai kelanjutan perjuangan PNI. Soekarno turut bergabung di dalam Partindo ini. Tentu saja penjara di Sukamiskin tidak memadamkan semangat perjuangan Bung Karno. Ia justru makin gigih memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Akibatnya, sekali lagi ia ditangkap Belanda pada 23 Desember 1933 .

Kali ini tidak tanggung-tanggung. Bung Karno dihukum atas dasar *exorbitante rechten*, yakni wewenang istimewa dari Gubernur Jenderal, pemimpin tertinggi pemerintahan kolonial di Hindia Belanda, untuk mengenakan sanksi pada setiap pembangkang dalam rupa *interneering* (pengasingan di tanah kolonial) atau *externeering* (pembuangan ke luar wilayah). Bung Karno terkena yang pertama. Ia diasingkan ke Ende.

Demikianlah, di atas kapal Van Riebeeck milik perusahaan pelayaran Belanda yang berlayar menuju Ende, wilayah jauh di timur kekuasaan pemerintah kolonial, berdirilah Bung Karno bersama istrinya Inggit Garnasih, anak angkatnya Ratna Djuami, serta mertuanya Ibu Amsi. Kapal itu berlayar pada musim hujan. Lautan di musim hujan bukanlah lautan yang tenang. Tentu saja kita tidak terlalu sulit membayangkan gelombang yang menampar-nampar sisi kiri dan kanan kapal. Bisa jadi, Bung Besar Kita, sang Proklamator Kemerdekaan bangsa Indonesia itupun sempat mengalami mabuk laut selama perjalanan itu.

Menyepi di Pengasingan

Pada 14 Januari 1934, kapal Van Riebeeck berlabuh di pelabuhan kecil Kota Ende yang juga kecil. Kesenyapan kota itu menyambut kedatangan Sang Singa Podium dari Jawa. Bung Karno tentu saja merasa kesepian. Bisa kita bayangkan, di atas geladak kapal, ia menyaksikan kota yang ketika itu hanya berpenduduk 5.000 orang. Atap-atap rumah hanya muncul satu dua saja di balik pepohonan khas daerah tropis. Berbeda dengan Batavia, pusat pemerintahan kolonial Belanda, yang hampir setiap akhir pekan didatangi Bung Karno ketika masih jadi orang bebas di Bandung.

Turun dari kapal, kesepianlah yang menyambut Bung Karno sekeluarga. Ende yang kecil itu tidak punya bioskop, perpustakaan umum, ataupun pusat hiburan—hal-hal yang tentu saja akrab bagi Bung Karno selama di Bandung. Penduduk Ende yang melek huruf kala itu mungkin bisa dihitung dengan jari. Tanah air Indonesia yang berbeda hadir langsung di depan mata Bung Karno; sebuah tanah air yang diimajinasikannya ketika membentuk PNI kini menunjukkan wajahnya yang berbeda. Pada detik-detik awal itulah pengasingan menjadi sesuatu yang harafiah bagi Bung Karno; ia benar-benar merasa terasing. Kebudayaan Ende jauh berbeda dengan kebudayaan Jawa dan Sunda, dua kebudayaan yang akrab Bung Karno sebelumnya. Mayoritas penduduk Kota Ende pun adalah pemeluk Katolik.

Pemeluk Islam memang ada di kota itu, namun jumlahnya sedikit sekali. Dua hal ini jauh sungguh dari kehidupan Bung Karno sebelumnya. Tentu saja Bung Karno mengetahui dua hal itu dari bacaan-bacaannya selama ini serta pergaulannya selama ini. Namun, pertemuan langsung tentulah berbeda efeknya dibandingkan dengan pengetahuan yang didapatkannya dari bacaan.

Di hari-hari pertama pengasingan di Ende, Bung Karno sekeluarga ditampung di pos militer Belanda. Barulah beberapa saat kemudian, seorang kawan dekatnya di Ende, Haji Abdullah Amburawu, memberikan rumahnya untuk didiami Bung Karno sekeluarga. Rumah berukuran 12 x 9 meter itu menjadi saksi hidup Bung Karno sekitar 4 tahun di kota Ende yang terpencil. Setiap hari, Bung Karno wajib melapor diri ke pos militer Belanda. Meskipun kecil, untuk ukuran masyarakat Ende waktu itu, rumah tersebut sudah cukup mewah; ada halaman yang luas dan juga kebun.



Rumah Pengasingan Soekarno di Ende

Jauh dari medan perjuangan, jauh dari kawan-kawan aktivis, jauh dari budaya yang diakrabinya tentu menyiksa Bung

Karno. Namun siksaan tidak berakhir sampai di situ. Ibu mertuanya, Ibu Amsi, meninggal di pangkuannya setahun setelah mereka tiba di Ende, tepatnya pada malam antara 11-12 Oktober 1935. Hingga saat ini, makam Ibu Amsi masih terawat baik oleh masyarakat Kota Ende. Bahkan, menurut pengakuan warga, makam itu cukup keramat. Banyak warga yang berziarah ke makam itu untuk berdoa dan mengharapkan pelbagai hal. Banyak di antaranya yang dikabulkan. Bung Karno begitu terpukul dengan kejadian itu, sebagaimana dilukiskannya melalui surat pada sahabatnya, T. A. Hassan, seorang tokoh Muslim di Bandung, “suatu percobaan yang berat bagi saya dan saya punya istri, yang—alhamdulillah, kami pikul dengan tenang dan tawakkal dan ikhlas kepada Ilahi.” Namun Bung Karno memang bermental baja. Masih di surat yang sama, ia merenungkan kejadian itu sebagai cobaan yang harusnya memperkuat mentalnya: “Yah, moga-moga Allah senantiasa mengeraskan apa yang masih lembek pada kami orang bertiga. Yang timah menjadi besi, yang besi menjadi baja, amin.” Di Ende pulalah Bung Karno mendapat kabar yang begitu memukul dirinya: HOS Tjokroaminoto, mentor serta mantan mertuanya, meninggal dunia pada 17 Desember 1934.

Suasana pengasingan di Ende ini membuat Bung Karno kesulitan untuk membaca dan menambah ilmu pengetahuannya. Sebagaimana yang digambarkan tadi, tidak ada satu pun perpustakaan umum di kota ini. Buku-buku yang dibawa Bung Karno pun semuanya sudah dibacanya berulang-kali. Untunglah ia masih bisa mendapatkan kiriman buku-buku dari kawan-kawannya di Jawa, meskipun kerap terlambat karena sangat bergantung pada kedatangan kapal dari Jawa ke Ende. Bukan cuma buku yang menjadi masalah bagi Bung Karno. Makanan pun sedikit-banyak menggangukannya. Ketika seorang kawannya mengirimkan biji jambu mede, Bung Karno sekeluarga begitu bersuka ria. Pasalnya, di Ende sulit untuk mendapatkan biji jambu mede dengan kualitas yang baik.

“Biji jambu mede menjadi ‘gajeman’ seisi rumah; di Ende ada juga jambu mede, tapi varietas ‘liar’, rasanya tak nyaman. Maklum, belum ada orang menanam varietas yang baik. Oleh karena itu, maka jambu mede itu menjadikan pesta. Saya punya mulut sendiri tak berhenti-henti mengunyah!”

Demikian keluh Bung Karno di dalam surat ucapan terima kasihnya kepada si pengirim biji jambu mede.

Jika keadaannya demikian, bagaimana pula bisa mendapatkan teman diskusi yang sepadan apalagi untuk membicarakan perjuangan kemerdekaan Indonesia? Hari-hari yang dilalui Bung Karno semasa awal-awal keberadaannya di Ende sangatlah menjemukan. Pada surat bertarikh 17 Juli 1935, Bung Karno mengeluhkan hal itu.

“Maklum, pekerjaan saya sehari-hari, sesudah cabut-cabut rumput di kebun, dan disampingnya ‘mengobrol’ dengan anak-bini buat menggembirakan mereka, ialah membaca saja. Berganti-ganti membaca buku-buku ilmu pengetahuan sosial dengan buku-buku yang mengenai Islam.... Di Ende sendiri tak ada seorangpun yang bisa saya tanyai, karena semuanya memang kurang pengetahuan (seperti biasa) dan kolot-bin-kolot. Semuanya hanya mentaqlil saja zonder tahu sendiri apa-apa yang pokok; ada satu dua berpengetahuan sedikit.”

Namun demikian, di dalam keadaan itu, Bung Karno masih terus mengadakan agitasi dan propaganda.

Bagaimana caranya Bung Karno mulai berbaur dengan masyarakat Ende yang lantas disebutnya sebagai “kawan-kawan saya di Ende” padahal jarak kebudayaan dan perbedaan agama Bung Karno dan mayoritas masyarakat Ende cukup jauh? Berada di pengasingan yang sepi membuat Bung Karno punya waktu yang

cukup banyak untuk memikirkan hal-hal lain di luar perjuangan politik. Selain karena memang dia diawasi soal itu, ia pun memang tidak mendapatkan kawan sepadan untuk membicarakan dan memperjuangkan hal itu. Ende adalah kota kecil nan terpencil di dalam wilayah kekuasaan pemerintah kolonial. Memberontak terhadap pemerintah Belanda di Ende barangkali faedahnya tidak terlalu besar. Di samping itu, Bung Karno perlu ‘mendidik’ terlebih dahulu masyarakat Ende untuk sadar dan keluar dari, menurut istilah Bung Karno, “kekolotannya”.

Keadaan yang sepi demikian itu juga membuat Bung Besar Kita punya waktu untuk menjelajahi hobi dan minat-minatnya di bidang selain politik. Bung Karno adalah orang yang begitu mencintai seni. Arsitektur sebagai bidang yang dipilihnya dalam pendidikan formal dan profesinya adalah bidang ilmu yang tak bisa dipisahkan dari seni. Selain itu, Bung Karno pun pernah berujar bahwa jika tidak menjadi politisi, ia ingin menjadi pelukis. Ia pun gemar melukis. Di Ende, untuk dekat dengan masyarakat, Bung Karno membentuk Kelompok Teater (atau yang disebut dengan Kelompok Tonil sebagaimana istilah di masa itu) dengan nama Kelimoetoe Toneel Club. Nama kelompok ini diberikan oleh Ibu Inggrit Garnasih yang terinspirasi dari nama danau tiga warna yang terletak di timur Kota Ende.

Kelimoetoe Toneel Club bukan sekadar hobi untuk Bung Karno. Lebih dari itu, kelompok ini adalah cara Bung Karno mendidik dan mengobarkan semangat perjuangan menuju Indonesia merdeka di kalangan masyarakat Ende yang terbelakang. Ini pun adalah strategi Bung Karno untuk mengelabui pengawasan dari polisi militer Belanda serta Raja Ende yang juga berpihak pada Belanda. Tidak heran, di dalam kelompok teater ini Bung Karno dibantu oleh masyarakat biasa, bukan kaum bangsawan di Kota Ende. Maklum, karena statusnya sebagai tahanan politik kolonial, Bung Karno dijauhi oleh masyarakat kelas atas. Mereka takut dicap pemberontak oleh pemerintah kolonial.

Awalnya, empat puluh orang bergabung dengan Bung Karno di dalam Kelimoetoe Toneel Club. Sebagaimana masyarakat Ende yang sudah digambarkan tadi, anggota kelompok ini tentu saja berasal dari masyarakat yang berbeda budaya, suku, dan agama. Mayoritas Kristen, namun ada pula yang Muslim. Sebuah kelompok teater haruslah membangun kerja sama demi kesuksesan pertunjukannya. Bung Karno, melalui kelompok teater ini, melihat secara langsung bagaimana anggota kelompok teaternya yang beragam latar keagamaan itu saling bergotongroyong. Di dalam kelompok toneel ini, Bung Karno menulis naskahnya dan menyutradarainya. Di Ende, Bung Karno menulis sekitar 13 naskah sandiwara yang hampir semuanya, secara tersirat maupun tersurat, berisi semangat kebangsaan dan nasionalisme. Dengan pertunjukan-pertunjukan Kelimoetoe Toneel Club, nama Bung Karno semakin terkenal, tidak hanya di kalangan pembesar tetapi semakin dikenal di kalangan masyarakat biasa. Maka semakin banyaklah yang bergabung ke dalam kelompok teater ini dari kalangan masyarakat biasa. Data terakhir menyebutkan, hampir 100 orang terlibat aktif di dalam kelompok teater ini.



Soekarno dan Para Personil Kelimoetoe Toneel Club Berpose Bersama

Bayangkan. Dalam keadaan diasingkan, ketika sayap-sayapnya dipatahkan, Bung Karno justru memberikan hiburan bagi masyarakat Kota Ende yang terpencil. Sungguh, sebuah perbuatan yang membawa kegembiraan bagi masyarakat. Ende yang jauh dari keramaian kota besar itu mendapatkan hiburan pertunjukan toneel yang bisa berjalan secara reguler. Memang kota itu tak punya gedung pertunjukan. Bung Karno bersama masyarakat Kota Ende lantas menggunakan gedung Societet milik Gereja Katolik, Gedung Imaculata, sebagai gedung pertunjukan toneel. Bung Karno pernah berhutang 70 Gulden uang sewa gedung itu (mata uang Belanda kala itu) kepada para pastor. Jauh hari setelahnya, Bung Karno masih mengingat itu. Di dalam pidatonya yang berjudul “Tauhid Adalah Jiwaku” ketika dikukuhkan sebagai Doktor *Honoris Causa* oleh Universitas Muhammadiyah di Istana Negara (3 Agustus 1965), Bung Karno berkata,

“Kepada umat Katolik saya juga mempunyai utang. Tatkala saya di Ende, Flores, saya banyak bergaul dengan pastor-pastor. Satu di antara pastor-pastor itu ialah Pastor Huitink. Pastor Huitink itu adalah administratur daripada gedung Societeit katolik di Ende. Saya sering menyewa gedung Societeit Katolik di Ende itu. Untuk apa? Buat main sandiwara, Saudara-saudara. Sewa. Nah, tapi maklum saja saudara-saudara, main sandiwara kadang-kadang rugi. Sehingga pada waktu saya diangkut oleh Belanda dari Ende pindah ke Bengkulu, saya masih berhutang kepada Pater Huitink 70 Gulden. Dan syukur alhamdulillah pula, tatkala saya beberapa tahun yang lalu berjumpa dengan Pater Huitink, saya minta diikhhlaskan 70 gulden ini. Jadi sekarang tidak punya utang.”

Dari pidatonya itu, kita bisa menyimpulkan, Bung Karno ingin mengatakan bahwa jalan perjuangan kemerdekaan Indonesia itu, sedikit banyak, merupakan andil semua anggota masyarakat Indonesia dari kalangan budaya manapun, dari kepercayaan dan agama manapun.

Kedekatan Bung Karno dengan para pastor di Ende diakuinya sendiri melalui suratnya kala itu. Maklum saja, kota ini memang sudah menjadi kota tempat berkumpulnya para misionaris Katolik sejak lama. Bung Karno mengisahkan hal itu kepada kawannya melalui sepucuk surat:

“...saya sendiripun banyak bertukaran pikiran dengan kaum pastur di Ende. Tuan tahu, bahwa Pulau Flores itu ada ‘pulau missi’ yang mereka sangat banggakan. Dan memang ‘pantas’ mereka membanggakan mereka punya pekerjaan di Flores itu. Saya sendiri melihat, bagaimana mereka ‘bekerja mati-matian’ buat mengembangkan mereka punya agama di Flores.

Saya ada ‘*respect*’ buat mereka punya kesukaan bekerja itu”

Tampak jelas bahwa mereka yang berbeda keyakinan dengan Bung Karno bukanlah dijauhi olehnya. Justru sebaliknya, ia kerap berdiskusi dengan mereka, ia belajar cara mereka bekerja, dan mengagumi ketekunan mereka. Lebih jauh lagi, ia berteman akrab, menjadi laksana saudara, dengan mereka. Naskah-naskah sandiwara Bung Karno yang berisi perjuangan dan pemberontakan terhadap Belanda itu bukannya tidak diketahui oleh sahabat-sahabatnya, para pastor itu. Namun, mereka tetap membiarkannya, bahkan membantunya di dalam persiapan-persiapan pertunjukan.

Di Ende juga, dalam kesepian pengasingan, Bung Karno punya waktu untuk merenungkan agamanya, Islam, dan merenung-renung akan itu. Ia secara intens berkirim surat dengan TA Hassan. Surat-surat ini lantas diterbitkan di bawah judul *Surat-surat Islam dari Ende*. Di dalam salah satu surat itu, ia juga mengkritik dengan keras pandangan Islam yang kuno,

“Islam adalah kemajuan, *progress*. Di dalam politik Islam pun orang tidak boleh meng-*copy* barang yang sudah lama, tidak boleh mengulangi zamannya khilafah-khilafah yang besar itu. Tidakkah di dalam langkah zaman yang lebih dari seribu tahun itu perikemanusiaan mendapatkan sistem-sistem baru yang lebih sempurna, lebih bijaksana, lebih tinggi tingkatnya daripada dulu?”

Bersamaan dengan itu, Bung Karno pun punya kesempatan merefleksikan keberadaan agama yang lain, Kristen Katolik, melalui pertemuannya dengan masyarakat di Kota Ende. Di tengah kesepian pengasingan, Bung Karno justru diajak hidup di tengah keberagaman, kebhinekaan.

Bung Karno yang awalnya hanya kenal saja dengan pastor-pastor, lama-kelamaan kerap berkunjung ke rumah (biara) para pastor itu, yakni di biara Santo Joseph. Di sanalah Bung Karno berkesempatan mendapatkan bacaan-bacaan baru, koleksi biara tersebut. Ia pun kerap berbagi pikiran dengan para pastor di sana. Lambert Giebels menulis demikian tentang persahabatan Bung Karno dengan para pastor SVD di Ende:

“Mula-mula, ia biasanya minum kopi dengan Pastor Huytink, setelah itu mendaki bukit mengunjungi Bruder Lambertus di bengkelnya. Dengan menggunakan alat-alat seadanya, Soekarno membetulkan perkakas rumah tangga atau merakit alat-alat yang dibutuhkan bersama Bruder. Akhirnya, Soekarno mengunjungi Pastor Bouma di beranda depan biara.... Dengan Bouma, Soekarno mengadakan percakapan-percakapan intelektual.”

Pastor Gerardus Henricus Huijtink, SVD., kawan minum kopinya Bung Karno, sungguh dikenang terus oleh Bung Karno. Presiden pertama Republik Indonesia ini memang punya sifat tidak gampang lupa pada kawan-kawannya, entah orang biasa maupun orang-orang seperjuangan. Ada cerita menarik tentang Arief, seorang supir taksi yang pernah dihutangi Bung Karno di Batavia. Setelah lama tidak bersua dengan Bung Karno, suatu ketika, di masa pendudukan Jepang, Bung Karno datang ke rumah sang supir taksi yang bersahaja itu. Selain membayar hutang ongkos taksi yang belum dibayarnya di masa penjajahan Belanda, Bung Karno lantas meminta Arief untuk menjadi supir pribadinya.

Dari dua sahabat pastornya itu, Bouma dan Huijtink, pernah terlontar sebuah pertanyaan yang membuat Bung Karno harus berpikir dan merenung cukup lama. Di sela-sela perbincangan antara mereka, pastor itu bertanya kepada Bung Karno demikian: “*di mana tempat mamamu yang beragama Hindu di*

dalam negara yang mayoritas Muslim?” Di kesempatan lain, mereka juga bertanya pada Putra Sang Fajar itu: *“di mana tempat orang-orang Flores yang mayoritas Katolik ini dalam negara yang marxis dan mayoritas Muslim itu?”* Bung Karno tercenung lama mendengar pertanyaan-pertanyaan itu.

Di Bawah Lindungan Pohon Sukun

Di Kota Ende yang sepi, selain melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah dibicarakan tadi, Bung Karno kerap menyepi di pinggir pantai. Kota Ende terletak di bagian selatan Pulau Flores. Dengan demikian, kota itu berhadapan langsung dengan Laut Sawu. Sejauh mata memandang dari pinggir pantai Kota Ende, kita hanya menemukan lautan semata. Ada satu-dua pulau kecil terlihat di kejauhan, tetapi di sepanjang cakrawala langit bertemu dengan lautan lepas.

Inilah alam yang menemani Bung Karno semasa pembuangannya di Ende. Pembuangan ke Ende adalah pembuangan pertama yang dialami Bung Karno. Sebelumnya, ia memang pernah dihukum oleh pemerintah kolonial, namun sekadar tahanan penjara di kota tempat ia menjalankan aktivitas politik, yaitu kota Bandung. Barulah di Ende Bung Karno merasakan sebuah hukuman yang lebih kejam, hukuman pembuangan di tanah kolonial. Untuk pejuang kemerdekaan masa itu, hukuman pengasingan ini termasuk hukuman yang tinggi, dikenakan untuk mereka yang aktivitas politiknya dianggap benar-benar membahayakan keamanan dan ketertiban negeri jajahan.

Inilah pertama kalinya Bung Karno dicerabut dari kota-kota tempat ia biasa beraktivitas. Dan memang itulah maksud dari pemerintah kolonial. Waktu luang menyeruak tumpah ruah di hadapan Bung Karno. Bagi seorang pemimpin partai politik yang gigih menentang penjajah, tentu keadaan ini sungguh mengubah semesta pengalaman. Bagi orang yang rajin menulis dan terlibat sebagai pemimpin redaksi di tiga terbitan, tentulah waktu luang

yang begitu banyak sungguhlah menyiksa. Bung Karno menggambarkan Ende, tempat pengasingannya itu, sebagai ujung dunia.

“Ende, kampung nelayan telah dipilih sebagai penjara terbuka untukku yang ditentukan oleh Gubernur Jenderal sebagai tempat di mana aku menghabiskan sisa umurku. Kampung ini mempunyai penduduk 5.000 kepala. Keadaannya masih terbelakang. Dalam segala hal, Ende di Pulau Bunga yang terpencil itu, bagiku menjadi ujung dunia.”

Waktu luang yang begitu luas di ujung dunia membuat Bung Karno banyak merenungkan dan merefleksikan perjalanan hidupnya, perjalanan perjuangan menuju Indonesia merdekanya, serta memikirkan masyarakat Indonesia. Sebagai orang yang romantis, kita bisa membayangkan bagaimana murungnya keadaan Bung Karno kala itu.

Di Ende, di tengah masyarakat yang melarat, Bung Karno pun melihat Indonesia yang tengah diperjuangkannya. Siapakah dia yang berjuang itu? Bung Karno tidak melihat dirinya sebagai orang yang lebih tinggi dari masyarakat Ende yang melarat itu. Ia justru melihat dirinya setara dengan mereka yang melarat itu. Masyarakat yang melarat, yang harkat dan martabatnya diinjak-injak oleh penjajahan Belanda, adalah cerminan dari dirinya juga sebagai seorang yang terbuang dan tertindas oleh penjajahan Belanda.

“Ende, sebuah kampung nelayan telah dipilih sebagai penjara terbuka untukku. Keadaannya masih terbelakang. Aku mendekat kepada rakyat jelata karena aku melihat diriku sendiri dalam orang-orang yang melarat ini. Di Ende yang terpencil dan membosankan itu, banyak waktuku terluang untuk berpikir.”

Di Ende, menurut pengakuannya dan menurut pengakuan orang-orang yang dekat dengannya di sana, Bung Karno punya sebuah tempat favorit untuk menyepi dan merenung. Umar, salah satu anggota muda Kelimoetoe Toneel Club, bersaksi: “Bung Karno suka duduk menghadap ke pantai, biasanya sehabis shalat subuh atau saat bulan terang. Beliau keluar rumah untuk jalan-jalan ke pantai, lalu duduk-duduk di bawah pohon sukun itu.”

Bayangkanlah seorang Bung Karno, dalam kesepiannya di Ende, pagi-pagi setelah shalat subuh, jalan menuju pantai dan duduk di atas sebuah batu, di bawah rindangnya pohon sukun. Di hadapannya, laut pagi berdeburan di bibir pantai. Keadaan pantai di Ende itu amatlah sepi. Barangkali ia hanya sekali atau dua kali bertemu orang lain di bibir pantai itu dalam kurun waktu empat tahun. Bayangkanlah sosok Bung Karno di tengah sinar bulan purnama, duduk sendiri di sana, memandang lekat-lekat laut yang menghampar hingga kejauhan.

Ketika itulah, di dalam laku yang seperti bersemedi, duduk diam merenung-renung berjam-jam, bisa kita bayangkan apa yang berkecamuk di kepala Bung Karno. Bisa jadi ia membayangkan tanah Jawa, Surabaya yang ramai, kawan-kawannya di HBS dulu, kawan-kawannya sesama penghuni asrama alm. HOS Tjokroaminoto. Ia tentu terkenang pula, dalam semacam *flashback*, perbincangan-perbincangan mereka soal penindasan Belanda terhadap rakyat Jawa, dan tentu pula ia mengenang pengajaran-pengajaran HOS Tjokroaminoto, bagaimana Singa Podium satu itu berpidato menggelorakan semangat masyarakat.

Ia juga tentu menerka-nerka, sedikit mereka-reka dalam pikiran juga barangkali, sepak terjang kawan-kawan seperjuangannya di tanah Jawa dari kabar yang diterimanya melalui surat dan bacaan yang terbatas. Ia teringat bagaimana dari bangku pesakitan di Pengadilan Bandung, ia melancarkan kritik terhadap kolonialisme Belanda yang sudah begitu lama mencengkeram tanah Nusantara. Di saat itulah, ia sadar akan

keberadaannya di kota Ende, sebuah kampung nelayan yang begitu jauh dari keramaian, sebuah kampung nelayan di ujung dunia yang diisi oleh segelintir masyarakat yang terbelakang. Barangkali di situ, ia lantas memikirkan ulang semangat persatuan Indonesia, semangat perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia yang pernah dengan berapi-apinya ia diskusikan bersama kawan-kawannya di *Algemeene Studieclub*, kemudian juga di PNI.

Ia juga teringat, bagaimana pemberontakan bersenjata kaum pejuang kemerdekaan Indonesia berhaluan sosialis di tahun 1926 yang mampu dipatahkan Pemerintah Penjajah Belanda. Lantas organisasi itu dilarang. Ia pun merenungkan kepulungan HOS Tjokroaminoto, orang kuat Sarekat Islam, dan kini Sarekat Islam mulai meredup perjuangannya. Bersamaan dengan itu, barangkali sekali waktu di bawah cahaya bulan yang terang, ia pun terusik pada pertanyaan kawan-kawan diskusinya di Ende, para pastor berkewarganegaraan Belanda, “*di mana tempat mamamu yang beragama Hindu di dalam negara yang mayoritas Muslim*”, “*di mana tempat orang-orang Flores yang mayoritas Katolik ini dalam negara yang marxsis dan mayoritas Muslim itu?*”

Di saat itulah Bung Karno menyadari keluasan Indonesia. Bukan keluasan fisik, namun keluasan psikis, bentangan semesta jiwa yang kaya dan tidak sederhana. Ia teringat akan Douwes Dekker, peranakan Indo yang begitu gigih melawan Belanda. Ia teringat akan Ki Hadjar Dewantara yang mungkin saat itu sedang menulis untuk majalah *Poesara* di Yogyakarta. Ia menjadi lebih sadar dari sebelumnya bahwa perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia itu diusahakan oleh semua golongan bangsa Indonesia. Ia juga barangkali terkenang pada kebesaran-kebesaran Majapahit di dalam cerita-cerita wayang di masa kecilnya, ia terkenang pada kehidupan di desa petani di Jawa, dipadukannya pula dengan pengalamannya di desa nelayan di Ende, ia terkenang pada kefasihan kawan-kawannya membaca buku-buku Belanda berpadu padan dengan masyarakat Ende yang tidak mengenal huruf sama sekali.

Bagi sosok dengan sepak terjang yang luas seperti Bung Karno, tidak sulit untuk kita bayangkan bagaimana begitu rupa pemikiran, begitu rupa permenungan menyeruak sekali waktu di dalam kepalanya. Sedangkan di depan sana, laut seolah tak ada putusnya, gelombang laut berdebur tak pernah lelahnya. Perlahan-lahanlah, di tengah kekerdilan dirinya di hadapan semesta ciptaan Tuhan dan terilhami oleh pohon sukun bercabang lima, perlahan-lahan lima sila yang menjadi dasar negara Indonesia merdeka mulai terbersit dalam benaknya. Demikianlah, bertahun-tahun kemudian, Bung Karno bersaksi:

“Suatu kekuatan gaib menyeretku ke tempat itu hari demi hari... Di sana, dengan pemandangan laut lepas tiada yang menghalangi, dengan langit biru yang tak ada batasnya dan mega putih yang menggelembung..., di sanalah aku duduk termenung berjam-jam. Aku memandangi samudera bergolak dengan hempasan gelombangnya yang besar memukuli pantai dengan pukulan berirama. Dan kupikir-pikir bagaimana laut bisa bergerak tak henti-hentinya. Pasang surut, namun ia tetap menggelora secara abadi. Keadaan ini sama dengan revolusi kami, kupikir. Revolusi kami tidak mempunyai titik batasnya. Revolusi kami, seperti juga samudra luas, adalah hasil ciptaan Tuhan, satu-satunya Maha Penyebab dan Maha Pencipta. Dan aku tahu di waktu itu bahwa semua ciptaan dari Yang Maha Esa, termasuk diriku sendiri dan tanah airku, berada di bawah aturan hukum dari Yang Maha Ada.”

Bung Karno tidak menciptakan sendiri Pancasila yang kala itu disebutnya sebagai “lima butir mutiara”. Ia menggali, merenungkan, segala hal yang ada di dalam kehidupan bangsa Indonesia yang tengah berjuang untuk merdeka,

“Di Pulau Bunga yang sepi tak berkawan, aku telah menghabiskan berjam-jam lamanya merenung di bawah pohon kayu. Ketika itulah datang ilham yang diturunkan Tuhan mengenai lima dasar falsafat hidup yang sekarang dikenal dengan Pancasila. Aku tidak mengatakan aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali tradisi kami jauh sampai ke dasarnya, dan keluarlah aku dengan lima butir mutiara yang indah”

Pancasila adalah saripati dari kebudayaan dan kehidupan Indonesia yang diamati Bung Karno, saripati cita-cita perjuangan dan upaya menuju kemerdekaan Indonesia yang diperjuangkan dari generasi ke generasi. Pancasila adalah intisari dari gerak langkah zaman di mana Bung Karno adalah salah satu yang berada di dalamnya. Pancasila adalah gambaran masyarakat Indonesia, kebudayaan dan cara hidup Indonesia, yang diamati, dirasakan, dan di dalamnya Bung Karno hidup. Sebuah masyarakat yang beragam yang kebhinnekaan dan perbedaan-perbedaannya dirasakan sendiri oleh Bung Karno.



Pohon Sukun di Ende Tempat Turunnya Inspirasi Pancasila

Di Ende yang sepi, Bung Karno mendalami lagi agamanya, agama Islam. Bersamaan dengan itu, ia berkenalan dan menjadi paham tentang agama Kristen dan Katolik. Maka, salah satu mutiara yang muncul di bawah pohon sukun itu adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Di Ende, Bung Karno mendapatkan waktu untuk menjauhi kebisingan perjuangan. Di sana ia merenung. Di sana ia memikirkan perihal perjuangan, sebuah perjuangan, perjuangan menuju manusia Indonesia yang harus diperlakukan adil dan harus melangkah menuju masyarakat yang beradab. Di Ende pula, ia melihat perbedaan demi perbedaan dari masyarakat Indonesia yang beragam. Ia jadi semakin yakin bahwa hal yang perlu diutamakan di dalam perjuangan menuju kemerdekaan ialah Indonesia yang bersatu, nasionalisme yang harus diletakkan mendahului segala perbedaan yang ada. Ia pun merenungkan

perjalanan perjuangan kemerdekaan, bagaimana kawan-kawan seperjuangan, dari pelbagai ideologi, dari pelbagai latar belakang, mau duduk bersama, bermusyawarah untuk saling membantu baik di dalam suka maupun duka, sebagaimana yang dirasakannya di dalam contoh kecil Kelimoetoe Toneel Club. Musyawarah adalah roh nya perjuangan. Sebuah kenyataan yang lantas ditorehkannya dengan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di Ende pula Bung Karno melihat kemelaratan rakyat secara langsung. Bersamaan dengan itu ia melihat cermin dirinya yang melarat, orang-orang yang dimelaratkan oleh penjajahan. Maka tidak bisa tidak, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah tujuan dari perjuangan itu. Sehingga tidak ada lagi kemelaratan dan penindasan di bumi Indonesia merdeka nanti.

Permenungan di bawah pohon sukun yang bercabang lima mengilhami penggalan lima sila yang menjadi dasar negara Indonesia merdeka. Pembuangan yang pada awalnya dimaksudkan untuk mematahkan sayap-sayap perjuangan Bung Karno, justru berbuah manis dengan menghasilkan renungan tentang Pancasila yang akan menjadi modal utama untuk perjuangan kemerdekaan serta kehidupan Indonesia merdeka di kemudian hari. Peristiwa pembuangan ke Ende yang memberi kesempatan untuk berpikir dan merenung bagi Bung Karno ini ibarat mundur selangkah untuk menemukan ancang-ancang menuju seribu langkah ke depan yang lebih mantap dan berani.

Pada 1954, setelah Indonesia merdeka, Bung Karno berkunjung kembali ke Ende. Di tempat itu, di dalam pidatonya, ia menggambarkan bagaimana turunnya inspirasi tentang Pancasila di bawah pohon sukun, di tepi Laut Sawu. Salah seorang kawannya, anggota Kelimoetoe Toneel Club, masih ingat betul kata-kata Bung Karno dalam pidato tersebut,

“Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, proses terbentuknya Pancasila ini memakan waktu lama,

melalui lembah air mata, melalui pengorbanan fisik dan perasaan. Beberapa kali aku ditangkap Belanda, beberapa kali aku diadili, masuk tahanan dan dipenjara. Syukur alhamdulillah, aku dibuang dan dikucilkan di Pulau Flores, tinggal bersama saudara-saudaraku di sini selama lebih kurang empat tahun. Dalam kurun waktu empat tahun itu aku menggali, menggali, dan menggali. Semangatku tidak pupus karena disingkirkan ke Ende ini. Apa yang bertahun-tahun aku tekuni telah mengendap dan mengkristal. Budaya bangsaku, warisan leluhurku telah aku kaji menjadi lima butir mutiara yang tersimpan sejak dulu dalam kalbu bangsaku di persada tanah air Indonesia.”

Ketika berpidato itu, Bung Karno tengah berdiri dan memandang pohon sukun yang sama, tempat ia dua puluh tahun yang lalu kerap duduk dan termenung. Pohon sukun bercabang lima yang menghilami Pancasila itu kini sudah tiada. Termakan usia, lapuk oleh waktu, ia rubuh pada 1960. Namun, di tempat ia berdiri, pemerintah Kota Ende menanam lagi pohon sukun yang lain pada 17 Agustus 1981. Pohon sukun yang baru ini, uniknya, setelah bertumbuh juga mempunyai lima cabang, sebagaimana pohon sukun pendahulunya. Seakan-akan benarlah apa yang dikatakan Bung Karno: “*Suatu kekuatan gaib menyeretku ke tempat itu hari demi hari*”.

Selamat Tinggal Ende

Setelah sekitar empat tahun menetap di Ende, oleh keputusan pemerintah kolonial Bung Karno lantas dipindahkan Bengkulu. Pemerintah Belanda sudah mencium sepak terjang Bung Karno di kota itu yang bukannya menyerah, melainkan menemukan celah-celah baru untuk melanjutkan perjuangannya.

Pada April 1938, barang-barang Bung Karno yang penting sudah mulai dipak dalam peti, siap diberangkatkan ke Bengkulu. Hal ini tampak pada surat Bung Karno untuk redaktur Majalah *Pujangga Baru* bertanggal 20 April 1938. Ketika itu, redaktur *Pujangga Baru* meminta Bung Karno untuk menulis perihal arsitektur Indonesia untuk media tersebut. Bung Karno tak bisa memenuhinya lantaran buku-buku rujukannya sudah masuk ke dalam peti. Ia mesti meninggalkan Nusa Bunga yang semula asing tapi kini telah jadi akrab baginya.

18 Oktober 1938 Bung Karno sekeluarga meninggalkan pelabuhan Ende menuju Bengkulu. Tapi dalam dadanya, ada satu hal yang ikut dibawanya pergi, satu hal yang belum ia dapatkan sewaktu tinggal di Jawa, satu hal yang akan tercetus dalam suatu persidangan besar di kemudian hari dan sejak saat itu menjadi fondasi dari negara Indonesia merdeka yang muda belia: Pancasila.

Lahirnya Pancasila: 1 Juni 1945

Pagi hari, 1 Juni 1945. Empat hari berselang setelah sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibuka. Seorang insinyur berusia 43 tahun maju ke mimbar. Di sampingnya duduk pimpinan sidang, Dr. Radjiman Wedyodiningrat, seorang dokter dan aktivis senior yang disegani dari era Boedi Oetomo. Di hadapannya berbaris lima deret meja di sebelah kiri yang berhadapan dengan lima deret meja di sebelah kanan. Pada kedua sisi deretan meja itu, duduk tokoh-tokoh terkemuka se-Indonesia, kaum cerdik pandai yang menjadi perwakilan dari berbagai pergerakan rakyat Indonesia.

Di baris sebelah kanan sang insinyur melihat Ki Hadjar Dewantara, seorang aktivis paripurna yang telah malang-melintang di alam pergerakan kebangsaan sejak awal abad ke-20. Sewaktu muda dan masih bernama Soewardi Soerjaningrat, ia pernah diinternir oleh Belanda akibat ketajaman penanya dalam mengkritik penindasan kolonial atas bangsa Indonesia. Beberapa meja serong ke kiri dari Ki Hadjar, sang insinyur menatap Haji Agoes Salim, cendekiawan Muslim asal Kota Gadang yang juga aktivis Sarekat Islam. Beberapa meja serong ke kiri dari cendekiawan kesohor itu, duduk pula Maria Ulfah Santoso, ketua pengurus besar Istri Indonesia, anggota Badan Pemberantas Buta Huruf dan Ketua Komisi Perkawinan dalam Badan Pekerja Kongres Perempuan Indonesia.

Di baris meja sebelah kiri sang insinyur menemukan Mr. Tan Eng Hoa, seorang peranakan Tionghoa yang juga ahli hukum asli Semarang. Dua saf di belakangnya, duduk ulama besar Kyai Haji Wahid Hasjim, seorang tokoh penting Nadhlatul Ulama asal Jombang. Sebelah kiri sang Kyai, duduklah P.F. Dahler, seorang peranakan Indo yang juga aktivis pergerakan Insulinde. Tiga meja di depannya, duduk Mr. Johannes Latuharhary, seorang ahli

hukum dari Saparua dan pengurus Parindra cabang Malang. Beberapa meja serong ke kiri, duduk pula Kyai Haji Mas Mansoer asal Surabaya yang pernah menjadi ketua pengurus besar Muhammadiyah Yogyakarta.

Berdirilah tegak sang insinyur di hadapan para anggota sidang yang terkemuka itu. Dengan getar suara yang sarat akan nyala api kemerdekaan, ia bicara soal keperluan untuk merumuskan suatu “pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat, yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi.” Ia lalu bicara tentang Pancasila.

Latar Persidangan BPUPKI

Sidang BPUPKI dibuka pada hari Senin, tanggal 28 Mei 1945, dengan amanat Saikoo Sikikan atau Panglima Tertinggi aparat pendudukan Jepang di Indonesia. Mengapa sidang yang mau mempersiapkan kemerdekaan Indonesia justru didukung oleh Jepang yang punya kepentingan menjajah Indonesia?

Pemerintahan pendudukan Jepang memang berjanji akan memberikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia sejak 7 September 1944. Janji ini merupakan bagian dari taktik penjajah Jepang untuk mendorong bangsa Indonesia berperang melawan pasukan Sekutu yang diperkirakan akan menyerbu Nusantara untuk mengusir Jepang dan mengembalikan pemerintahan jajahan Hindia Belanda. Karena hendak memanfaatkan semangat perjuangan bangsa Indonesia inilah, Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kuniaki Koiso mengumumkan pada tanggal 7 September 1944 bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Maka dibentuklah BPUPKI pada tanggal 29 April 1945 dengan tugas menyusun rancangan Undang-Undang Dasar.

Akal bulus Jepang ini sudah dicium para pimpinan pergerakan kebangsaan Indonesia. Mereka tahu bahwa Jepang sudah di penghujung kekalahan karena pihak Sekutu telah berhasil merebut Eropa dari tangan fasisme Hitler dan Mussolini.

Kehilangan sekutu-sekutunya di Eropa, kekuasaan Jepang atas Asia Timur dan Tenggara tinggal menunggu hitungan bulan. Menyadari hal ini, para pemimpin pergerakan sengaja memanfaatkan taktik Jepang untuk menyusun landasan bagi negara Indonesia merdeka. Dengan adanya landasan itu, bangsa Indonesia dapat berjuang menegakkan kemerdekaannya dari penjajahan Belanda maupun Jepang.

Berkumpullah tak kurang dari 68 tokoh pergerakan di gedung Chuo Sangi In. Fungsi gedung ini adalah sebagai tempat berkumpulnya Badan Pertimbangan Pusat yang bertugas memberikan masukan pada pemerintahan pendudukan Jepang mengenai perkara sosial dan politik. Semula gedung ini dikenal sebagai gedung Volksraad atau lembaga perwakilan rakyat zaman Belanda. Sekarang gedung ini masih berdiri. Namanya kini Gedung Pancasila dan terletak di kompleks Kementerian Luar Negeri.



Gedung Chuo Sangi In yang Sekarang Disebut Gedung Pancasila

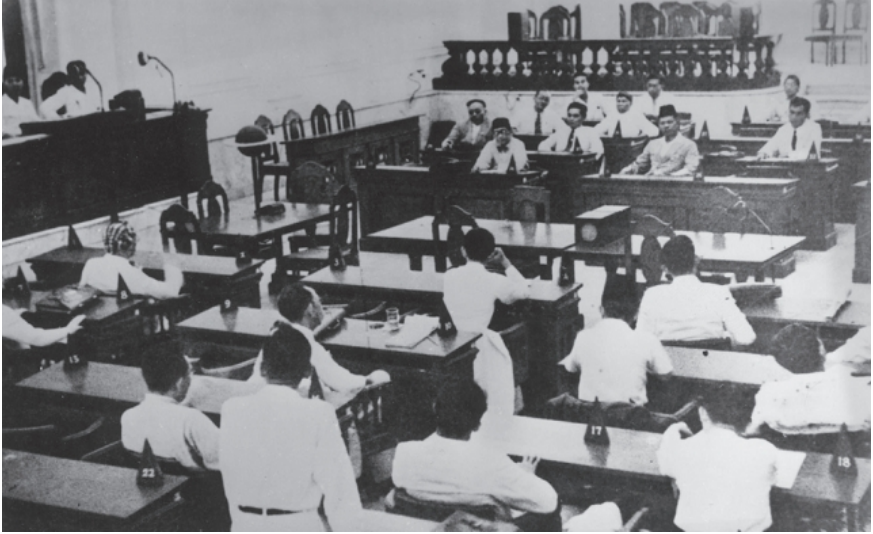
Di sana, diselenggarakan sidang-sidang BPUPKI yang antara 28 Mei – 1 Juni 1945 dan 10 – 17 Juli 1945. Agenda utamanya menentukan dasar negara, bentuk negara, wilayah negara, warga negara serta rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah dibuka oleh Saikoo Sikikan pada hari Senin, 28 Mei 1945, persidangan dilangsungkan sampai dengan tanggal 1 Juni 1945 untuk mendiskusikan dasar negara Indonesia merdeka.

“Negara Indonesia Ketiga” versi Mr. Muhammad Yamin

Mr. Muhammad Yamin, ahli hukum asal Sawahlunto itu mengawali sesi pertama pada hari Selasa, 29 Mei 1945, pukul 11.00 dengan uraian sejarah kerajaan-kerajaan kuno Nusantara, paparan tentang beragam teori politik dan ditutup dengan sebuah sajak enam bait yang berbunga-bunga berjudul *Republik Indonesia*. Sebagai dasar negara, ia mengusulkan diadopsinya kelima prinsip berikut:

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat

Ia tidak memberi nama pada kelima prinsip itu. Tapi ia memberikan penjelasan panjang-lebar tentang kelimanya, walaupun cenderung kurang sistematis, kerap kali keluar dari topik dasar negara dan masuk ke perkara lain-lain, seperti misalnya “budi-pekerti negara”, “pembelaan negara”, “daerah negara”, “penduduk” dan lain sebagainya.



Suasana Sidang BPUPKI, 29 Mei 1945
(Sumber: ANRI)

Yamin adalah seorang nasionalis. Ia membayangkan negara Indonesia merdeka sebagai kelanjutan dari kemaharajaan Sriwijaya dan Majapahat. Walaupun sebetulnya menyalahi kaidah ilmu sejarah, ia tak segan-segan menyebut Syailendra-Sriwijaya (600 – 1400) sebagai “Negara Indonesia pertama” dan Majapahit (1293 – 1525) sebagai “Negara Indonesia kedua”. Sehingga, dalam benaknya, negara Indonesia yang sedang digagas dasarnya dalam sidang BPUPKI itu adalah “Negara Indonesia ketiga”. Bedanya, menurut Yamin, “Negara-Negara Indonesia” yang lama itu berasaskan kerajaan, sementara negara Indonesia yang akan dimerdekakan saat ini akan berasaskan kebangsaan. “Peri Kebangsaan” yang ada dalam bayangan Yamin adalah gagasan bahwa negara Indonesia seyogianya didirikan atas dasar sifat-sifat bangsa Indonesia sendiri, tidak mencontek dari luar negeri. Artinya, negara Indonesia mesti didirikan atas dasar adat-istiadat yang berlaku di seluruh bangsa Indonesia.

Yamin bicara juga soal “Peri Kemanusiaan”. Yang ia maksudkan adalah pengakuan hukum sedunia atas bangsa Indonesia, pengakuan bahwa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Menurutnya, kemerdekaan yang tertinggi hanya terwujud apabila suatu negara dianggap setara dengan negara lainnya. Tidak ada kemerdekaan sejati bagi negara yang merupakan “negara persemakmuran” (*dominion* atau *protectoraat*), yang ada berkat restu negara induk. Untuk benar-benar merdeka, sebuah negara harus diakui statusnya sama dengan negara-negara lain: tersusun oleh peri kemanusiaan yang sama.

Mengenai “Peri Ketuhanan”, Yamin tidak terlalu banyak bicara. Ia cuma menyebut bahwa “bangsa Indonesia yang akan bernegara merdeka itu ialah bangsa yang beradaban luhur dan peradabannya itu mempunyai Tuhan Yang Maha Esa”. Ia menegaskan bahwa negara Indonesia itu hendaklah “berketuhanan”.

Pokok soal “Peri Kerakyatan” diuraikan dengan sangat panjang oleh Yamin. Baginya, Peri Kerakyatan itu adalah dasar musyawarah. Semua-semua yang menyangkut kehidupan negara seyogianya dimusyawaratkan. Ia mengutip Surat Asysyura Ayat 38 dalam Al-Qur’an yang berbunyi: “Segala urusan mereka dimusyawaratkan”. Artinya, negara Indonesia harus disusun atas dasar demokrasi sehingga urusan negara tidak dipikul oleh seorang pemimpin saja tapi melibatkan dialog dengan rakyat banyak. Selain itu, Peri Kerakyatan itu juga berdasar pada prinsip perwakilan. Dalam bermusyawarah, tidak mungkin semuanya diputuskan oleh keseluruhan rakyat. Harus ada wakil-wakil rakyat yang mempermudah jalannya permusyawaratan untuk sampai pada keputusan. Hal ketiga yang mendasari Peri Kerakyatan ialah kebijaksanaan. Bagi Yamin, negara Indonesia merdeka hendaknya dikelola berdasarkan nalar. Semua diskusi kenegaraan harus dilangsungkan dengan mengandalkan akal, bukan bergantung

pada sentimen, takhayul, anarkhisme ataupun warisan semangat penjajahan.

Mengenai “Kesejahteraan Rakyat”, Yamin tidak terlalu jelas menyampaikan pokok pikirannya. Ia cenderung melompat ke urusan penentuan daerah negara, definisi penduduk dan putera negara Indonesia. Yamin cuma menyebut bahwa Kesejahteraan Rakyat yang ia maksud itu sama dengan “keadilan sosial” dan negara Indonesia yang akan merdeka nantinya menjadi suatu “Negara Kesejahteraan baru”.

Kelima prinsip yang diajukan Yamin bukanlah Pancasila. Walaupun ada rumusan-rumusan yang agak mirip dengan Pancasila, ide-ide pokok Pancasila tidak berkembang dalam uraiannya. Ia tidak bicara soal Persatuan Indonesia, tidak juga menguraikan secara memadai soal Keadilan Sosial. Pandangannya tentang dasar negara masih bercampur-baur dengan pandangannya tentang bentuk negara, wilayah negara dan warga negara.

“Negara Totaliter” versi Dr. Soepomo

Pada tanggal 31 Mei 1945, giliran Dr. Soepomo, sang ahli hukum adat Jawa, untuk menyampaikan pikirannya tentang dasar negara. Setelah memaparkan berbagai teori tentang negara dari para pemikir Eropa, Soepomo menegaskan bahwa negara Indonesia merdeka hendaknya disusun atas dasar sifat khas masyarakat Indonesia sendiri. Negara Indonesia merdeka tidak seharusnya dibangun dengan menjiplak masyarakat di luar Nusantara. Corak dan bentuk negara itu harus disesuaikan dengan perikehidupan masyarakat yang nyata.

Soepomo lantas mencela apa yang disebutnya “kebudayaan Barat”. Orang Barat, kata Soepomo, berpegang pada prinsip perseorangan (individualisme). Prinsip perseorangan telah mengantarkan bangsa-bangsa Eropa pada keangkar-murkaan. Bagi sang ahli hukum adat Jawa, individualisme model Barat menyebabkan orang-orang sebangsa bersaing dengan keras

dan saling menjatuhkan. Akibatnya, tumbuhlah konflik berkepanjangan di masyarakat Barat. Selain itu, akibat rasa perseorangan yang terlalu kuat, warga negara-negara Eropa juga enggan berbakti pada tanah airnya.

Sebaliknya, kata Soepomo, orang Timur tidak mengenal asas perseorangan. Semua orang dianggap sebagai anggota keluarga. Semua pekerjaan dijalankan secara bersama-sama. Oleh karena itu, negara Indonesia merdeka harus diselenggarakan atas dasar kekeluargaan dan gotong-royong. Selain itu, pergaulan hidup bernegara semestinya disusun atas cita-cita persatuan mutlak antara rakyat dan pemimpinnya. Dengan mengutamakan asas kekeluargaan dan gotong-royong, Soepomo melihat bahwa negara Indonesia merdeka seharusnya dilandasi oleh cita-cita harmoni dan persatuan. Dengan begitu angkara-murka gaya Barat (individualisme, persaingan dan konflik) dapat dihindarkan dari negara Indonesia merdeka.

Melalui dasar negara yang diusulkannya itu, Dr. Soepomo kemudian membayangkan bentuk negara Indonesia merdeka. Dalam imajinasinya, negara merdeka itu haruslah suatu “negara totaliter” seperti Jerman di bawah pimpinan Adolf Hitler atau Jepang di bawah kaisar Tennoo Heika. Maksudnya dengan istilah “negara totaliter” ialah suatu negara yang meniadakan perbedaan antar golongan masyarakat, meleburkan seluruh golongan itu ke dalam satu zat, yakni rakyat yang bersatu jiwa dengan pemimpinnya. Maka itu, ia menolak demokrasi yang bergantung pada asas perseorangan.

Kemudian Dr. Soepomo membayangkan adanya sosok pemimpin ideal yang dapat menyatu dengan jiwa rakyat banyak. Ia membayangkan Kepala Negara yang mempunyai sifat “Ratu Adil”, sesosok raja dalam mitos orang Jawa yang akan menyelamatkan seluruh rakyat dari marabahaya. Ia menyerukan bahwa “dalam Negara Indonesia itu hendaknya dianjurkan supaya para warga negara *cinta* kepada tanah air, *ikhlas* akan diri sendiri dan suka *berbakti* kepada tanah air; supaya mencintai dan berbakti

kepada *pemimpin* dan kepada *negara*; supaya *takluk* kepada Tuhan, supaya tiap-tiap waktu ingat kepada Tuhan.”

Pandangan Dr. Soepomo tentang dasar negara terlalu menekankan pada persatuan dan kurang memberikan pertimbangan pada aspek-aspek lain dari perikehidupan masyarakat Indonesia. Ia menginginkan adanya dasar negara yang mencerminkan keadaan nyata masyarakat Indonesia, tetapi tidak berhasil merumuskan dasar negara yang betul-betul memayungi keaneka-ragaman praktik hidup masyarakat Indonesia. Imajinasinya tentang “negara totaliter” dicomot begitu saja dari praktik kekuasaan raja-raja Timur dan tidak memperhitungkan semangat rakyat Indonesia yang ingin merdeka tidak saja dari penjajahan Belanda, tetapi juga dari penindasan para priyayi dan hierarki kerajaan yang feodal. Ingatlah bahwa “tanam paksa” yang sangat kejam terhadap nasibnya rakyat Jawa itu dikerjakan tidak hanya oleh Belanda, tetapi juga dengan bantuan para bangsawan Jawa pemilik tanah yang siap sedia menekan hidup rakyat untuk meraup laba dari Belanda. Karena gagal membaca sejarah bangsa Indonesia, Soepomo pun gagal sampai pada visi Pancasila.

“Negara Pancasila” versi Ir. Soekarno

Maka kembalilah kita pada 1 Juni 1945. Sebuah pagi di hari Jumat yang cerah. Insinyur kita telah memulai pidatonya. Semua mata tertuju pada sosoknya yang berdiri gagah di depan mimbar. Bung Karno, insinyur negara Indonesia merdeka itu, mengawali pidatonya dengan sebuah pertanyaan sederhana: Apa itu “kemerdekaan”? Apa yang dimaksud dengan kata “merdeka”?

Waktu Ibnu Saud memerdekakan Arab Saudi, kata Bung Karno, 80% dari rakyatnya masih hidup dalam alam kegelapan. Konon pada suatu hari mobil Ibnu Saud mau diberi makan gandum oleh penduduk Saudi Arabia karena mereka belum pernah melihat mobil dan mengiranya sejenis onta. Dengan kemerdekaan yang baru dinyatakannya itu, barulah bangsa Arab Saudi belajar membaca-tulis, bercocok tanam, hidup secara teratur. Demikian

pula dengan negara Rusia, Mesir dan negara-negara merdeka lainnya. Kemerdekaan itu tidak ditunggu datangnya, tapi direbut, dinyatakan sekarang juga.

Melalui cerita itu, Bung Karno menyindir kekhawatiran para pemimpin pergerakan yang telah menyampaikan pandangannya yang rumit tentang dasar negara sepanjang tiga hari sebelumnya. Mereka berdebat demikian rumit tentang teori-teori politik Barat, agak gentar dan takut salah dalam merancang dasar negara Indonesia merdeka. Bung Karno bertanya: Sudah berpuluh-puluh tahun berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, sekarang ada kesempatan merdeka kok malah kita gentar?

Kemerdekaan itu ibarat “jembatan emas”, kata Bung Karno. Kemerdekaan bukanlah tujuan akhir dari perjalanan suatu bangsa, melainkan jembatan menuju tujuan akhir itu. Lewat kemerdekaan lah, lewat jembatan emas itulah, kita mewujudkan cita-cita kebangsaan yang selama ini—di masa belum merdeka—hanya tinggal cita-cita belaka. Jadi jangan berharap semua cita-cita itu sudah harus terpenuhi sebelum kita merdeka. Justru lewat kemerdekaan itulah kita kejar cita-cita kita.

Insinyur kita mengumpamakan kemerdekaan dengan perkawinan. Ada orang yang takut kawin. Ada orang yang mau menunggu punya rumah bertingkat, permadani, tempat tidur mewah, baru berani menikah. Ada juga orang yang berani kawin kalau sudah punya satu meja, empat kursi, satu dipan dan tempat tidur. Tapi ada juga yang lebih berani, yakni kaum Marhaen, rakyat kecil pemberani, yang hanya punya gubug dengan satu tikar dan satu periuk nasi berani menikah. Tidak ada yang bisa menjamin siapa yang bakal lebih bahagia: si kaya yang peragu atau si miskin yang pemberani? Demikian pula kemerdekaan.

“Soalnya,” kata Bung Karno, “kita ini berani merdeka atau tidak?” Soalnya bukan apakah kita sudah cukup kaya atau belum untuk merdeka. Kalau menunggu kekayaan terkumpul, mungkin baru 50 tahun lagi kita merdeka. Soalnya bukan apakah kita sudah cukup terdidik untuk merdeka atau belum. Kalau mesti menunggu

70 juta rakyat Indonesia mengenyam pendidikan menengah, mungkin baru seratus tahun lagi kita merdeka. Soalnya bukan apakah bangsa kita sudah cukup sehat untuk merdeka atau belum. Kalau mau menunggu seluruh rakyat Indonesia bebas disentri, busung lapar, malaria, demam berdarah, influenza, batuk-pilek, seratus tahun pun kita mungkin belum merdeka. Soalnya sederhana saja: kita ini berani merdeka atau tidak? Itu saja.

Hanya dengan merdeka, kita bisa mengusahakan jalan keluar atas semua masalah yang selama ini membelenggu kita dan membuat kita ragu-ragu merdeka. Hanya dengan merdeka, dengan mendirikan pemerintahan yang mandiri, kita dapat memberantas buta huruf, menyembuhkan busung lapar, memperkaya bangsa Indonesia. Bung Karno berseru: “Di dalam Indonesia Merdeka itulah kita memerdekakan rakyat kita! Di dalam Indonesia Merdeka itulah kita memerdekakan hatinya bangsa kita!” Untuk itu, rebutlah dulu “jembatan emas” menuju masa depan itu. Rebutlah dulu kemerdekaan kita.

Para anggota sidang bertempik sorak mendengar uraian Bung Karno. Mereka tak bisa memungkiri kebenaran perkataan insinyur kita. Untuk menyelesaikan masalah-masalah bangsa, pertama-tama bangsa itu harus merdeka terlebih dulu.



Bung Karno Berpidato pada 1 Juni 1945 di Sidang BPUPKI
(Sumber: ANRI)

Bung Karno kemudian melanjutkan dengan pandangannya tentang dasar negara. Ia tidak mengacu ke teori-teori rumit, tidak mengacung-acungkan buku-buku tebal. Yang kita butuhkan, kata insinyur kita, bukanlah bangunan teori yang pelik dan terperinci. Yang kita butuhkan adalah dasar negara yang dapat segera diterapkan untuk membangun negara Indonesia merdeka. Untuk itu, ia berangkat dari pengalaman bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda, dari praktik hidup yang tersebar di berbagai kelompok masyarakat Indonesia.

Pertama-tama, ia menyebut asas kebangsaan. Indonesia tidak hanya terdiri dari etnis Jawa saja, tetapi juga Minang, Batak, Dayak, Bali, Flores, Bugis, Minahasa, Ambon, Papua, peranakan Arab, peranakan Tionghoa, peranakan Indo dan sebagainya. Mereka pun berbeda-beda agama: ada yang Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu dan berbagai aliran kepercayaan lainnya. Kebiasaan, adat, tradisi, gaya hidup dan alam pemikiran pun

berlainan sifatnya. Maka dari itu, jelas bahwa negara Indonesia merdeka tidak bisa didirikan atas dasar satu etnis atau satu agama atau satu adat-istiadat saja. Negara Indonesia merdeka harus didirikan atas dasar *persatuan* dari berbagai macam perbedaan di antara rakyat yang tinggal di Nusantara. Oleh karena itu, Bung Karno mengusulkan dengan jitu, negara Indonesia merdeka harus didirikan atas dasar *kebangsaan*.

Kebangsaan Indonesia tidak ditentukan atas dasar etnis maupun agama. Kebangsaan Indonesia ditentukan atas dasar perasaan senasib sepenanggungan di bawah penjajahan dan solidaritas bersama untuk lahir kembali sebagai satu bangsa merdeka. Kebangsaan Indonesia adalah persatuan dari semua etnis yang ada di Indonesia, dari semua pemeluk agama dan keyakinan yang ada di Indonesia. Kebangsaan Indonesia adalah hasil dari usaha politik bersama untuk bebas dari penjajahan dan membangun susunan masyarakat yang merdeka, yang adil dan makmur tanpa penindasan. Kebangsaan Indonesia adalah milik siapa saja yang berjuang bagi kemerdekaan Indonesia.

Kedua, Bung Karno menyebut asas internasionalisme atau peri kemanusiaan. Rasa kebangsaan kita semestinya bukanlah rasa kebangsaan yang sempit, yang memuja kekuatan bangsa sendiri tapi merendahkan kekuatan bangsa-bangsa lain. Rasa kebangsaan kita haruslah diwarnai pula oleh rasa kemanusiaan, perasaan senasib sepenanggungan dengan sesama manusia dari berbagai bangsa. Kita mau mendirikan negara Indonesia merdeka atas dasar “persaudaraan dunia”, “kekeluargaan bangsa-bangsa”, bukan atas dasar rasa mau menang sendiri. Artinya, negara Indonesia merdeka hendaknya dibangun di atas dasar usaha untuk menegakkan keadilan dan keadaban dalam pergaulan antar bangsa. Dengan begitu, negara Indonesia merdeka turut memperjuangkan nasib bangsa lain yang terkena penjajahan dalam rangka menjaga ketertiban dan peradaban dunia. Solidaritas antar bangsa inilah yang ia sebut sebagai internasionalisme.

Ketiga, insinyur kita menyebut asas mufakat atau demokrasi. Ia mengatakan: "Kita hendak mendirikan suatu negara 'semua buat semua'. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya, tetapi 'semua buat semua'." Maksudnya, negara Indonesia merdeka tidak didirikan atas dasar penguasaan seorang atau segelintir orang atas jutaan rakyat, melainkan atas dasar kedaulatan yang dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia.

Negara hadir untuk menjamin pemenuhan kepentingan umum bangsa Indonesia, bukan demi kepentingan golongan, bukan demi menang-menangan satu golongan di atas golongan lainnya, satu gagasan di atas gagasan lainnya. Oleh karena itu, negara Indonesia merdeka perlu dibangun di atas satu dasar yang merangkul setiap golongan demi menjamin kepentingan rakyat Indonesia seluruhnya. Maka hendaklah dalam mengurus kehidupan bernegara, setiap orang mengedepankan kesediaan untuk bermusyawarah, merundingkan segala sesuatunya sehingga dicapai suara bulat atau mufakat. Tanpa asas mufakat atau demokrasi ini, negara akan terpuruk ke dalam kesewenangan yang akan memecah-belah bangsa Indonesia.

Keempat, Bung Karno menyebut asas kesejahteraan sosial. Apabila asas ketiga, yakni mufakat, adalah soal demokrasi politik, maka asas keempat mengenai kesejahteraan sosial ini adalah soal demokrasi ekonomi. Yang ditekankan oleh sang insinyur lewat asas ini ialah keterlibatan yang setara antara seluruh rakyat Indonesia dalam urusan perekonomian. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni agar tiap-tiap rakyat dapat mengenyam nikmatnya kemerdekaan di lapangan perekonomian.

Ia memberikan contoh. Di Amerika Serikat sudah ada demokrasi politik. Setiap orang di sana punya hak suara yang sama di hadapan hukum. Akan tetapi, di Amerika Serikat tidak ada demokrasi ekonomi. Hanya segelintir orang Amerika yang menguasai kehidupan perekonomian negeri, sementara sisanya

tertindas oleh upah yang kecil tanpa bisa berbuat banyak. Di sana tidak terwujud “keadilan sosial”. Itulah akibatnya kalau kesejahteraan sosial tidak dijadikan cita-cita yang mendasari negara.

Negara Indonesia merdeka haruslah bertumpu pada prinsip kesejahteraan sosial. Setiap unsur masyarakat Indonesia mesti diupayakan agar dapat mencecap manisnya buah kemerdekaan. Bung Karno menyebutnya sebagai persamaan di lapangan ekonomi, yakni kesejahteraan bersama yang adil bagi seluruh bangsa Indonesia.

Kelima, Bung Karno menyebut asas Ketuhanan. Negara Indonesia merdeka bukanlah suatu negara teokratis atau negara berdasarkan hukum agama. Akan tetapi, negara Indonesia merdeka mesti dibangun di atas dasar kesepakatan bersama bahwa dalam ber-Tuhan hendaknya selalu hormat-menghormati antar pemeluk agama dan keyakinan yang berbeda. Inilah yang ia sebut sebagai “ber-Tuhan secara kebudayaan”. Artinya, mengamalkan ajaran agama masing-masing dengan menjunjung tinggi usaha pemeluk agama lain untuk mengamalkan ajaran agamanya.

Dengan dasar Ketuhanan ini, dimaksudkan agar dalam menjalankan kehidupan bernegara bersama, bangsa Indonesia senantiasa menjauhkan diri dari “egoisme agama”. Maksudnya, agar supaya dalam mengamalkan ajaran suatu agama, setiap pemeluk agama di Indonesia tidak merasa paling benar sendiri dan merendahkan agama lain. Hendaklah laku ber-Tuhan itu dijalankan dengan cara yang berkeadaban, pesan Bung Karno. Inilah inti dari asas Ketuhanan.

Kelima dasar negara Indonesia merdeka itu dinamai Bung Karno “Pancasila”. Inilah dasar negara kita, Pancasila yang terlahir sebagaimana aslinya pada tanggal 1 Juni 1945:

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan
3. Mufakat atau demokrasi

4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan

Inilah intisari dari praktik hidup bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan dan mengusahakan kemerdekaan. Penomoran 1 sampai 5 di muka tidak mencerminkan peringkat atau prioritas. Kelima sila dalam Pancasila harus dibaca sebagai suatu kesatuan yang saling mengisi. Kelimanya sederajat dan sama-sama membimbing bangsa Indonesia menuju kemerdekaannya.

Dari yang lima itu, Bung Karno menawarkan kemungkinan yang lebih ringkas. Ia mengintisarikan kelima sila itu menjadi tiga sila. Asas kebangsaan dan internasionalisme dapat diringkas menjadi “sosio-nasionalisme”. Ini adalah suatu semangat nasionalisme yang menghargai solidaritas antar bangsa. Asas mufakat dan kesejahteraan sosial dapat diringkas menjadi “sosio-demokrasi”. Ini adalah suatu semangat demokrasi yang tak berhenti pada demokrasi politik saja, tetapi juga memadukan demokrasi ekonomi. Dengan demikian, dalam sanubari Panca Sila terdapatlah “Trisila”:

1. Sosio-nasionalisme
2. Sosio-demokrasi
3. Ketuhanan yang menghormati satu sama lain

Dari tiga sila ini, Bung Karno menawarkan lagi kemungkinan yang jauh lebih ringkas. Kalau Pancasila dapat diintisarikan menjadi Trisila, maka Trisila dapat diintisarikan menjadi satu sila pokok. Inilah “Ekasila”: *gotong-royong*. Inilah batu penjurur yang menopang semua sila dalam Trisila dan Pancasila. Inilah dasar dari segala dasar negara Indonesia merdeka.

Jadi intisari paling mendasar dari Pancasila adalah gotong-royong, yakni kerjasama penuh kesuka-relaan antara unsur-unsur pendukung kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan sosial dan Ketuhanan. Bung Karno berseru-seru: “Gotong-royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua.

Holopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama!” Gotong-royong adalah watak dasar bangsa kita. Atas dasar inilah kita merdeka.

Seputar Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Mengapa bentuk Pancasila yang dicetuskan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 bereda dari Pancasila yang kita kenali sekarang? Hal ini ada sejarahnya.

Oleh karena pada masa persidangan pertama BPUPKI (28 Mei - 1 Juni 1945) belum tercapai kata sepakat tentang dasar negara, maka dibentuklah Panitia Sembilan yang bertugas merampungkan naskah mengenai dasar negara yang akan menjadi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketua dari Panitia Sembilan ini tak lain adalah Soekarno. Melalui rapat-rapat khusus yang mereka selenggarakan, Panitia Sembilan ini menyunting rumusan Pancasila Soekarno dan mengubah urutan penyebutannya. Pada tanggal 22 Juni 1945, tercapailah kesepakatan di antara sembilan orang itu mengenai rumusan dasar negara.

Rumusan dasar negara itu tercantum dalam dokumen yang kemudian disebut sebagai “Piagam Jakarta”, yang sebetulnya merupakan rancangan awal dari Pembukaan UUD 1945. Dokumen itu menyebut tentang...

“Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat-kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Rumusan Piagam Jakarta tentang Pancasila sebagai dasar negara ini menjadi kontroversial karena memasukkan unsur salah satu agama (Islam) dalam rumusan dasar negara. Bangsa Indonesia bukan hanya beragama Islam, tetapi juga Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan beragam aliran kepercayaan lainnya. Oleh karena itu, dasar negara yang semestinya mewadahi semua golongan juga semestinya tidak menyebut salah satu agama saja.

Perdebatan seputar rumusan sila pertama dalam Pancasila ini memuncak dengan munculnya pandangan bahwa apabila rumusan “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” itu tidak dicabut, maka sebagian besar Indonesia Timur akan memisahkan diri. Melihat situasi yang memanas, Mohammad Hatta meminta Kasman Singodimedjo untuk membujuk Ki Bagoes Hadikoesoemo yang bersikukuh mempertahankan rumusan tersebut. Melalui pembicaraan dengan Kasman, maka hati Ki Bagoes pun luluh. Ia berbesar hati mengesampingkan kepentingan golongan demi mengedepankan persatuan nasional.



Soekarno Memimpin Sidang PPKI
(Sumber: ANRI)

Alhasil, pada sidang pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), tepat sehari setelah proklamasi 17 Agustus 1945, dicapai kata mufakat untuk rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Maka ditetapkanlah Pembukaan UUD 1945 yang antara lain menegaskan tentang...

“Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Demikianlah, semangat dasar Pancasila 1 Juni 1945 tetap dipertahankan sembari diperbaiki rumusannya dalam Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Inilah Pancasila yang menjadi dasar negara kita. Penjelasan atas rumusan resmi Pancasila 18 Agustus 1945, oleh karena itu, mesti kita cari pada Pancasila 1 Juni 1945 yang merupakan sumbernya.

Pancasila: Dari Merdeka Hingga Kini

Pancasila di Masa Revolusi Fisik

Sebagai dasar negara, Pancasila mengalami masa-masa sulit pada periode awal Indonesia merdeka. Kehendak Belanda untuk kembali menguasai Indonesia melalui macam-macam perang di berbagai daerah, mempersulit rakyat Indonesia membangun negara dan pemerintahannya. Demikian pula dengan situasi ekonomi dan politik di dalam negeri sendiri yang masih kacau. Sehingga konsentrasi dari pemerintah pada masa itu adalah banyak berkait dengan hal Pengakuan Kedaulatan Indonesia. Dengan kata lain, bangsa Indonesia sudah menyatakan kemerdekaannya, sudah menyatakan dasar bernegara dan konstitusinya, tetapi ruang untuk bernegaranya selalu diganggu oleh Belanda.

Dalam hal ini, Belanda berikhtiar membuktikan kepada dunia internasional bahwa Proklamasi Indonesia adalah bukan kehendak rakyat Indonesia, melainkan ulah segelintir ekstremis. Lebih jauh lagi, Belanda berpikir bahwa setelah kekalahan Jepang dalam perang dunia II, dan kemudian Jepang menyatakan bahwa wilayah Indonesia adalah wilayah *status quo* (kosong kekuasaan) maka adalah hak Belanda untuk kembali mengambil yang menjadi miliknya di masa lalu.

Terhitung sejak pecah perang 10 November 1945 di Surabaya, berikutnya tentara Kerajaan Belanda NICA melakukan sejumlah penyerbuan dan pendudukan di beberapa daerah sampai dengan tahun 1948. Belanda membangun sejumlah negara boneka yang tunduk pada kekuasaannya, seperti Negara Dayak Besar (7 Desember 1946), Negara Indonesia Timur (24 Desember 1946), Negara Kalimantan Tenggara (8 Januari 1947), Negara Kalimantan Timur (12 April 1947), Negara Kalimantan Barat (12 Mei 1947), Negara Bangka (12 Juli 1947), Negara Biliton (12 Juli 1947), Negara

Riau (12 Juli 1947), Negara Sumatera Timur (25 Desember 1947), Negara Banjar (14 Januari 1948), Negara Madura (20 Februari 1948), Negara Pasundan (24 April 1948), Negara Sumatera Selatan (30 Agustus 1948), dan Negara Jawa Timur (26 November 1948).

Pada peringatan 17 Agustus 1946, Presiden Soekarno berpidato dengan menggambarkan situasi saat itu:

“Dengan pengertian yang sedalam-dalamnya serta keyakinan yang sekuat-kuatnya, akan arti persatuan bangsa, maka pemerintah selalu mencari mempersatukan, selalu menghindarkan perselisihan, selalu menunjuk kepada ajaran sejarah: ‘bersatu kita teguh, bercerai kita jatuh’. Kita mengalami penembakan Banyuwangi, pelabuhan beras yang oleh penembakan itu menderita rusaknya gudang-gudang, tenggelamnya beberapa kapal pengangkut, kocarcacirnya persediaan gabah, sehingga terhalang benar-benar sempurnanya usaha kita di tempat itu untuk memenuhi panggilan peri kemanusiaan menolong bangsa india, yang menderita bahaya kelaparan.”

Kemudian pada awal tahun 1947, Wakil Presiden Mohammad Hatta seusai shalat Jumat di Malang menyampaikan amanat sebagaimana yang diberitakan oleh Kantor Berita Antara:

“Selanjutnya beliau mengharap supaya bangsa Indonesia seumumnya bersatu, tegak sama tinggi dan duduk sama rendah, seperti dalam mesjid waktu sembayang. Untuk mencapai persatuan itu maka kita harus lebih sering bermusyawarat dan bertukar pikiran, agar lebih erat hubungan antara kita sama kita.”

Pada akhir Agustus 1946, pemerintah Inggris mengirimkan Lord Killearn ke Indonesia untuk menyelesaikan perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Pada tanggal 7 Oktober 1946, bertempat di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta, dibukalah perundingan Indonesia-Belanda dengan dipimpin oleh Lord Killearn. Perundingan ini menghasilkan persetujuan gencatan senjata (14 Oktober) dan meratakan jalan ke arah perundingan di Linggarjati yang dimulai tanggal 11 November 1946 dan ditandatangani pada bulan Maret 1947. Namun, pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini, dan pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah Agresi Militer Belanda I.

Terhadap Agresi Militer ini, Presiden Soekarno mengungkapkan amarahnya di hadapan Komite Nasional Indonesia pada tahun 1947:

“Dengan istimewa saya tandaskan di sini, bahwa kita sebagai satu bangsa yang sopan, tetap berkewajiban menjamin keselamatan jiwa dan benda segala penduduk itu, - baik penduduk bangsa Indonesia, maupun penduduk bangsa Tionghoa, maupun penduduk bangsa lain. Tiap-tiap perang membawa penderitaan, tiap-tiap perang adalah penderitaan, tetapi kita musti sedia meringankan, - bukan menambah dengan tidak perlu -, penderitaan penduduk itu. Buat apa kita berperang? Justru buat membela keselamatan negara, membela keselamatan penduduk, membela keselamatan rakyat!

Yakinlah, saudara-saudara di luar Jawa dan Sumatera dan Madura, - dengan hilangnya Republik akan hilang pula dibasmi oleh Belanda pergerakan kemerdekaan di luar Republik. Kita yang 70.000.000 jiwa ini, kita bangsa yang satu. Dan kita bangsa yang satu ini mempunyai cita-cita-bangsa, mempunyai cita-cita-

kebangsaan bersama-sama: ialah, supaya bangsa yang satu ini hidup sebagai bangsa yang merdeka, tersusun di dalam satu Negara yang merdeka, bernaung di bawah satu Bendera Sang Merah Putih yang Merdeka. Empat puluh tahun hampir, kita bersama-sama berjuang, bersama-sama menderita, bersama-sama berkorban, untuk mencapai cita-cita-kebangsaan kita itu. Dan hasil pertama yang besar daripada perjuangan-bersama, penderitaan-bersama, pengurbanan-bersama kita itu ialah Republik Indonesia ini! Republik Indonesia, yang kini hendak dihancurkan oleh Belanda.”

Kutipan-kutipan di muka adalah gambaran bagaimana Soekarno-Hatta memimpin negeri menghadapi situasi perang, dengan tetap berpijak pada upaya-upaya membumikan Pancasila. Dengan kata lain, kendati negara Republik Indonesia belum mendapatkan pengakuan kedaulatan secara internasional, tetapi kedua proklamator ini terus meyakinkan publik, bahwa negara Indonesia itu ada dan memiliki prinsip-prinsip dasar, yang terkandung dalam Pancasila. Lebih jauh lagi Bung Karno meyakinkan rakyat Indonesia tentang wujud dari negara yang berdasarkan Pancasila:

“Republik itu berarti memperjuangkan modal perjuangan seluruh bangsa Indonesia, mempertahankan pokok jaminan bagi pelaksanaan Negara Nasional Indonesia, Rumah Pengayoman bagi seluruh bangsa Indonesia yang 70.000.000. Republik adalah penjelmaan, perwujudan, konkretisasi dari cita-cita kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia, yang sudah dicapai dengan keringat, dengan darah, dengan air-mata bermilyun-milyun bangsa kita, ... konkretisasi, baik dengan rupa kekuasaan dan alat-kenegaraan ke dalam, maupun dengan rupa perhubungan dengan negara-negara-merdeka di luar. Konkretisasi cita-cita kebangsaan yang berwujud

Republik ini adalah dua hak milik seluruh bangsa Indonesia, hak milik kita semua, dari Sabang sampai ke Merauke, dari Uluksu sampai ke Kupang. Konkretisasi cita-cita-kebangsaan itu menjadi modal bagi seluruh bangsa Indonesia untuk meneruskan perjuangannya. Republik adalah ibarat pemegang amanat atas modal tersebut, tetapi kewajiban memeliharanya sebagai modal-perjuangan, terletaklah di atas pundak seluruh bangsa Indonesia. Terletak di atas pundak rakyat di Jawa, Sumatera dan Madura, tapi juga terletak di atas pundak-mu, hai saudara-saudara di Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Sunda-Kecil, Maluku, dan Irian!”

Setelah perundingan Renville, dan kemudian perundingan Roem-Roijen pengakuan kedaulatan Indonesia diperoleh melalui Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Maka terbentuklah negara Republik Indonesia Serikat (RIS) dan karenanya dibentuklah Konstitusi RIS yang di dalamnya tercantum rumusan Pancasila versi RIS.

Tetapi usia RIS tak lama mengingat adanya adanya demonstrasi besar-besaran dari rakyat yang menuntut kembalinya Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, terbentuknya RIS tidak sejalan dengan keinginan para pendiri negara, sehingga beberapa negara bagian RIS memutuskan bergabung kembali dengan NKRI. Akhirnya pemerintah membubarkan Republik Indonesia Serikat dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan Undang Undang Dasar Sementara sejak 17 Agustus 1950, dengan menganut sistem kabinet parlementer

Versi Proklamasi 1945	Versi RIS 29 Desember 1949 – 17 Agustus 1950	Versi UUDS 1950 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959
<p>“...susunan Negara Republik Indonesia yang Berkedaulatan Rakyat dengan berdasarkan kepada <u>Ketuhanan yang Maha Esa</u>, <u>Kemanusiaan yang Adil dan Beradab</u>, <u>Persatuan Indonesia</u>, dan <u>Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Permusyawaratan/ Perwakilan</u>, serta dengan mewujudkan suatu <u>Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia</u>.”</p>	<p>“Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu Piagam negara yang berbentuk republik-federasi, berdasarkan pengakuan <u>Ketuhanan Yang Maha Esa</u>, <u>perikemanusiaan</u>, <u>kebangsaan</u>, <u>kerakyatan</u>, dan <u>keadilan sosial</u>.”</p>	<p>“Maka demi ini kami menjusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam Negara yang berbentuk republik-kesatuan, berdasarkan <u>ke-Tuhanan Jang Maha Esa</u>, <u>peri-kemanusiaan</u>, <u>kebangsaan</u>, <u>kerakjatan dan keadilan sosial</u>, untuk mewujudkan kebahagiaan, kesedjahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara-hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna”</p>

Pancasila di Masa Demokrasi Parlementer

Selepas pengakuan kedaulatan, Pancasila kembali diuji. Kali ini ujiannya lebih berkenaan dengan upaya membangun bangsa dan negara. Dalam hal ini, semenjak kembali ke bentuk Negara Kesatuan dari bentuk RIS, terjadi beberapa kali pergantian

kabinet dan sejumlah peristiwa pemberontakan. Singkat kata, situasi pertentangan politik di antara berbagai partai politik dan organisasi telah menghambat gerak maju pembangunan. Baru pada tahun 1951 Pancasila kembali dikumandangkan oleh Bung Karno, sebagai kritik dan refleksi terhadap situasi yang berkembang pada masa itu:

“Ya memang sebagian dari bangsa kita sekarang ini sedang tergendam oleh sesuatu ide. Bukan oleh Ide Pancasila sebagai terletak di dalam Undang-Undang Dasar Negara kita, tetapi Ide di luar Pancasila itu. Ada yang merah, dan ada yang hijau. Dan lihatlah akibatnya! Di mana-mana bangsa kita jiwanya kabur dan bingung seperti tiada pedoman. Di mana-mana bangsa kita terpecah-belah. Di mana-mana bangsa kita dengki-mendengki satu sama lain. Di mana-mana bangsa kita boleh disepertikan orang yang merobek-robek dadanya sendiri. Di mana-mana pertumpahan darah. Di mana-mana harta-milik tidak aman lagi. Di mana-mana merosot arbeids-productiviteit. Di mana-mana suburlah pertikaian-pertikaian yang dibikin-bikin. Di mana-mana dilupakan, bahwa nama Indonesia harus dijunjung tinggi.

Tetapi bagaimanakah semangat 17 Agustus 1945 itu? Semangat 17 Agustus 1945 adalah semangat keikhlasan. Semangat pengorbanan. Semangat persatuan. Semangat Pancasila. Semangat pembangunan, membangun Negara dan Masyarakat dari ketiadaan. Pada 17 Agustus 1945 itu kita sungguh tidak mempunyai apa-apa, melainkan rancangan Undang-Undang Dasar, lagu Indonesia Raya, Bendera Merah Putih, secarik kertas Proklamasi. Tetapi pada waktu itu hidup dalam kalbu kita, hidup betul-betul suci-murni dalam kalbu kita -, semangat Pancasila!”

Kritik yang dikemukakan oleh bung Karno ternyata tidak cukup mempan. Situasi pertikaian di antara kekuatan-kekuatan politik terus berlanjut dan pergantian kabinet susul-menyusul terjadi. Contohnya dalam pelaksanaan Pemilihan Umum pada tahun 1955. Pemilu 1955 bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam parlemen dan dewan Konstituante. Pemilihan umum ini diikuti oleh partai-partai politik yang ada serta oleh kelompok perorangan. Pemilihan umum ini sebenarnya sudah dirancang sejak kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953-12 Agustus 1955) dengan membentuk Panitia Pemilihan Umum Pusat dan Daerah pada 31 Mei 1954. Namun pemilihan umum tidak dilaksanakan pada masa kabinet Ali I karena terlanjur jatuh. Kabinet pengganti Ali I yang berhasil menjalankan pemilihan umum, yaitu kabinet Burhanuddin Harahap.

Pemilihan umum untuk anggota DPR dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955. Hasilnya diumumkan pada 1 Maret 1956. Urutan perolehan suara terbanyak adalah PNI, Masyumi, Nahdatul Ulama dan PKI. Selain memilih anggota DPR, Pemilu 1955 juga memilih anggota Dewan Konstituante. Pemilihan Umum anggota Dewan Konstituante dilaksanakan pada 15 Desember 1955. Dewan Konstituante bertugas untuk membuat Undang-Undang Dasar yang tetap, untuk menggantikan UUD Sementara 1950.

Pada tanggal 10 November 1956, Presiden Soekarno membuka sidang pertama Dewan Konstituante dengan menyatakan:

“Kita bukan tidak memiliki Konstitusi, malah dengan konstitusi yang berlaku sekarang, kita sudah memiliki tiga konstitusi.... Tapi semua konstitusi [itu]... adalah bersifat sementara. Dan semua konstitusi itu bukanlah hasil permusyawaratan antara anggota-anggota sesuatu konstituante yang dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum yang bebas dan

rahasia. Semua konstitusi itu adalah buatan sarjana konstitusi, atas amanat pemerintah. Tapi semua negara hukum yang demokratis, menghendaki sebagai syarat mutlak sebuah konstitusi yang dibuat oleh rakyat sendiri....”

Namun pembahasan dalam Dewan Konstituante mengenai dasar negara mengalami banyak kesulitan. Hal ini lebih disebabkan oleh adanya konflik dan pertentangan ideologis antara partai-partai besar yang memegang kendali Dewan Konstituante. Dalam pembahasannya, terdapat 3 usulan Dasar Negara Indonesia, yakni Pancasila, Islam, dan Sosial Ekonomi. Namun, ketiganya mengerucut menyisakan Pancasila dan Islam sebagai usulan dasar negara yang mendapat dukungan banyak dari anggota Dewan Konstituante. Anggota dewan yang beraliran nasionalis mendukung Pancasila, dan anggota yang beraliran agamis mendukung dasar negara Islam diterapkan.

Ini terkait juga dengan tuntutan kekuatan politik yang mendukung dasar negara Islam agar ada amandemen untuk UUD 1945, yaitu masuknya tujuh kata di Pembukaan dan di pasal 29. Tujuh kata itu, "dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya," tercantum dalam Piagam Jakarta yang dicetuskan pada 22 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI. Semula, tujuh kata itu termasuk dalam rancangan Pembukaan UUD. Namun, kata-kata ini kemudian dihapus ketika PPKI mengesahkan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945.

Sementara, di kalangan masyarakat, pendapat-pendapat untuk kembali kepada UUD 1945 semakin kuat. Dalam menanggapi hal itu, Presiden Soekarno lantas menyampaikan amanat di depan sidang Konstituante pada 22 April 1959 yang isinya menganjurkan untuk kembali ke UUD 1945. Pada 30 Mei 1959, Konstituante melaksanakan pemungutan suara. Hasilnya 269 suara menyetujui UUD 1945 dan 199 suara tidak setuju. Meskipun yang menyatakan setuju lebih banyak dan tetapi makanya pemungutan suara ini

harus diulang, karena jumlah suara tidak memenuhi kuorum. Kuorum adalah jumlah minimum anggota yang harus hadir di rapat, majelis, dan sebagainya (biasanya lebih dari separuh jumlah anggota) agar dapat mengesahkan suatu putusan.

Oleh karena situasi yang demikian, dan Dewan Konstituante tidak juga melahirkan kata sepakat, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang berisi:

“Bahwa andjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 jang disampaikan kepada segenap rakjat Indonesia dengan amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959 tidak memperoleh keputusan dari Konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Sementara;

Bahwa berhubung dengan pernjataan sebagian besar anggota-anggota Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar untuk tidak lagi menghadiri sidang. Konstituante tidak mungkin lagi menjelesaikan tugas jang dipertjajakan oleh rakjat kepadanya;

Bahwa hal jang demikian menimbulkan keadaan-keadaan ketatanegaraan jang membahayakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa, dan Bangsa, serta merintanggi pembangunan semesta untuk mencapai masjarakat jang adil makmur;

Bahwa dengan dukungan bagian terbesar rakjat Indonesia dan didorong oleh kejakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunya djalan untuk menjelamatkan Negara Proklamasi;

Bahwa kami berkejakinan bahwa Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945 mendjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut,

Maka atas dasar-dasar tersebut di atas,

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA
TERTINGGI ANGKATAN PERANG

Menetapkan pembubaran Konstituante;

Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai hari tanggal penetapan dekrit ini dan tidak berlakunja lagi Undang-Undang Dasar Sementara.

Pembentukan Madjelis Permusjawaratan Rakyat Sementara, jang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara akan diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnja.”

Memasuki periode 1960-an, Bung Karno kembali memasyarakatkan Pancasila seturut garis Revolusi Agustus, yaitu demi menyelamatkan cita-cita kemerdekaan. Dalam pidatonya tanggal 17 Agustus 1960, Bung Karno menyatakan:

“Pancasila makin lama makin dijadikan perkataan di bibir saja, tanpa isi yang membakar cinta, tanpa arti yang menghidup-hidupkan semangat dan keyakinan, tanpa *bezieling* yang membakar-menggempameledak-ledak dalam kalbu dan dalam jiwa. Ini berarti, bahwa makin lama makin kita merasa kehilangan satu ideologi nasional, atau satu Konsepsi Nasional, yang jelas, tegas, terperinci. Tanpa Ideologi Nasional yang terpapar jelas dan Konsepsi Nasional yang tegas, kita kata, tak mungkin sesuatu bangsa memperjuangkan dan membina iapunya Hari Depan yang berencana, yaitu ya tujuan politik, ya tujuan ekonomi, ya tujuan sosial, ya tujuan kebudayaan, – buat tingkatan yang sekarang, buat tingkatan-depan yang dekat, buat tingkatan-depan yang terakhir, –

tingkatan Finale, yang Merdeka-Penuh, Makmur-Penuh, Adil-Penuh, Damai-Penuh, Sejahtera-Penuh, sesuai dengan Amanat Penderitaan Rakyat, dan sesuai dengan ujaran-ujaran nénék-moyang kita: ‘gemah-riyah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja!’”

Akan tetapi sebelum gagasan Soekarno tentang Pancasila ini sempat terealisasi, pertentangan politik yang berlangsung di tahun 1965 melahirkan praktek politik kekerasan yang berujung pada pergantian pemerintahan. Presiden Soekarno dianggap tidak mampu mengendalikan situasi kekerasan yang bermula pada tanggal 30 September 1965 yang berlangsung saat itu, dan diminta mundur sebagai Kepala Negara oleh MPRS beberapa tahun kemudian. Pancasila kembali diuji untuk tegak berdiri sebagai ideologi negara, dan peringatan terhadap peristiwa kekerasan itu kemudian dihormati sebagai Hari Kesaktian Pancasila.

Pancasila di Masa Orde Baru

Pada tahun 1968, Presiden Soeharto yang menggantikan Soekarno mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 1968 yang menjadi panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Instruksi Presiden tersebut mulai berlaku pada tanggal 13 April 1968. Sepuluh tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 22 Maret 1978, rumusan Pancasila itu ditetapkan secara resmi melalui Ketetapan (disingkat TAP) MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa). Tak hanya menetapkan, TAP MPR ini juga

menjabarkan kelima asas dalam Pancasila menjadi 36 butir pedoman praktis pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 36 butir pedoman itu kemudian dikenal sebagai “P4”.

Agar penghayatan dan pengamalan Pancasila bisa berlangsung nyata di tengah masyarakat, pemerintah melalui Keputusan Presiden (Keppres) No 10/1979 membentuk Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang biasa dikenal dengan nama BP-7. Tugas dari BP-7 ini antara lain adalah merumuskan kebijaksanaan dan program nasional mengenai pendidikan pelaksanaan P4 di kalangan masyarakat dan di lingkungan lembaga-lembaga Pemerintah. BP-7 juga bertugas menyelenggarakan pendidikan atau penataran pelaksanaan P4 bagi calon-calon penatar yang diperlukan bagi masyarakat dan lembaga-lembaga Pemerintah, serta membina, mengawasi dan mengkoordinasi penyelenggaraan pendidikan atau penataran yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat dan lembaga-lembaga Pemerintah.

Pada masa Orde Baru, aktivitas penataran P4 diwajibkan bagi semua warga negara Indonesia, terutama mulai dari jenjang pendidikan sekolah menengah atas sampai perguruan tinggi. Lebih jauh lagi, sertifikat keturutsertaan warga dalam penataran P4 menjadi syarat wajib untuk mendapatkan pekerjaan di lingkungan pemerintahan.

Selain itu, pemerintah Orde Baru juga menyeragamkan asas semua kekuatan politik di Indonesia, yang ditandai pidato Presiden Suharto di depan Sidang Papaturna DPR pada 16 Agustus 1982. Dengan kata lain, pemerintah mengharuskan setiap organisasi politik maupun organisasi massa untuk mengadopsi asas tunggal Pancasila dan harus mengakui posisi Pancasila sebagai pemersatu bangsa.

Sebagai akibatnya, Pancasila yang dimodifikasi dengan tambahan Ekaprasetia Pancakarsa (36 butir P4) tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi difungsikan juga sebagai

sarana pembentukan moralitas individu. Tujuannya adalah membentuk apa yang pada saat itu disebut-sebut sebagai “manusia Pancasila”. Itulah manusia Indonesia yang perilaku dan tindak tanduknya diharapkan bersesuaian dengan 36 butir penghayatan dan pengamalan Pancasila. Di sini, Pancasila tidak lagi berfungsi sebagaimana mulanya. Pancasila tidak menjadi dasar yang mengatur semua kehidupan bernegara, tetapi diarahkan untuk mengatur pula semua urusan privat warga negara.

Pada tahun 1998, seiring dengan lengsernya Presiden Soeharto dari kursi kekuasaan, MPR membuat ketetapan (Tap MPR XVIII/MPR/1998) yang mencabut TAP MPR tentang Ekaprasetia Pancakarsa. Keputusan ini dilandasi alasan bahwa Pancasila plus Ekaprasetia Pancakarsa justru menjadi kehilangan arahnya karena difungsikan untuk mengurus segala urusan yang sebetulnya tidak berkaitan dengan kehidupan bernegara. Oleh karena itu dalam Tap MPR tersebut dinyatakan secara tegas bahwa “Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara”.

Pancasila di Era Kekinian

Era Reformasi yang diawali dengan kejatuhan Soeharto, memberikan kesempatan sekali lagi untuk pelaksanaan Pancasila sebagaimana aslinya, yakni sebagai dasar negara merdeka yang hendak melenyapkan penjajahan di muka bumi. Semangat asli Pancasila ini terus coba dimaknai kembali oleh pemerintah-pemerintah yang jatuh bangun selama periode awal Reformasi. Proses pemaknaan ini mencapai titik terang dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mendasarkan program kerjanya pada prinsip-prinsip politik Soekarno.

Pemerintahan Jokowi di era Reformasi berangkat dari upaya mengembalikan Pancasila sebagai dasar negara melalui

ajaran Bung Karno tentang “Trisakti”, yaitu tiga prinsip bersikap: berdaulat secara politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Secara praktis, Pancasila menjadi jiwa dan roh bagi agenda prioritas pemerintahan Joko Widodo. Agenda prioritas yang berjumlah sembilan itu disebut sebagai “Nawacita”:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara
2. Membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor sektor strategis ekonomi domestik
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh kebhinekaan & memperkuat restorasi sosial Indonesia

Nawacita butir 9 menyatakan secara tegas bahwa negara menjunjung tinggi keragaman (kebhinekaan) serta mengupayakan pemulihan hubungan sosial di Indonesia dengan menciptakan dialog antar warga negara. Kata ‘melindungi warga negara’ mencerminkan aspek inklusif dengan tidak memandang afiliasi mereka dalam kelompok-kelompok politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Inilah semangat sila ketiga: Persatuan Indonesia. Bahwa Indonesia merdeka dan berdiri di atas kaki sendiri atas dasar cita-cita bersama untuk mempersatukan seluruh bangsa.

Lebih jauh lagi, Presiden Joko Widodo dalam peringatan Hari Lahir Pancasila 2016 mengajak rakyat bersama-sama menghayati semangat kemerdekaan yang bersumber pada ide, cita-cita dan gagasan besar Bung Karno. Ia mengingatkan kita akan gagasan dan harapan Bung Karno untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka, yakni Indonesia yang berdaulat, berdikari dan berkepribadian:

“Saya selalu teringat pidato Bung Karno 1 Juni 1945, 70 tahun yang lalu di depan sidang Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang menyatakan, Pancasila itulah yang berkobar-kobar di dada saya sejak berpuluh-puluh tahun; diterima atau tidak terserah saudara-saudara. Tapi saya sendiri mengerti seinsyaf-insyafnya bahwa tidak satu pun akan menjelma dengan sendirinya menjadi realita jika tidak dengan perjuangan.

Kita tidak boleh berhenti, adalah tugas kita bersama untuk membumikan Pancasila, menjadikannya realitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Republik ini sejatinya bukan sebuah negara yang dibangun untuk satu golongan ataupun beberapa kelompok saja, republik ini memerlukan persatuan, memerlukan kebersamaan, memerlukan gotong royong dari berbagai elemen bangsa.

Perjuangan kita sebenarnya menjebol mentalitas bangsa yang berada dalam keterjajahan, penindasan dan ketidakadilan, dalam ketidakmerdekaan, serta membangun mentalitas baru sebagai bangsa merdeka 100 persen.”

Dengan demikian, Presiden Joko Widodo mengembalikan pengertian Pancasila pada semangat aslinya—semangat Pancasila

1 Juni 1945. Di situ menjadi jelas bahwa Pancasila tertanam di buminya bangsa Indonesia merdeka, dalam aliran darahnya perjuangan melawan kolonialisme, di taman-sarinya keberagaman budaya bangsa. Pancasila adalah dasar mengapa kita semua bisa ada di sini sebagai bangsa Indonesia.

Garuda Pancasila, Akulah Pendukungmu!

Pada tahun 1956, seorang komponis muda bernama Sudharnoto menggubah lagu berjudul *Mars Pancasila*. Setiap anak sekolah di Indonesia menyanyikannya, bahkan sampai sekarang. Masyarakat saat ini mengenalnya sebagai lagu *Garuda Pancasila*.

*Garuda Pancasila
Akulah pendukungmu
Patriot proklamasi
Sedia berkorban untukmu*

*Pancasila dasar negara
Rakyat adil makmur sentosa
Pribadi bangsaku
Ayo maju maju
Ayo maju maju
Ayo maju maju*

Nampak benar dalam liriknya bagaimana Garuda Pancasila hadir sebagai perwujudan dari kemerdekaan bangsa Indonesia. Cita-cita luhur tentang “rakyat adil makmur sentosa” yang “maju” dengan “pribadi bangsaku” dan berlandaskan Pancasila sebagai “dasar negara” tetaplah relevan hingga kini.

Sudharnoto tidak sendirian merasakan gelora kemerdekaan itu. Kita semua yang kini memperingati 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila pun merasakan pula. Perjalanan bangsa telah mengantarkan kita pada berbagai cobaan: kerusuhan berlatar prasangka etnis pada bulan Mei 1998 di Jakarta, konflik sosial berlatar sentimen agama di Poso (1998-2000) dan Ambon (2011), terorisme dengan alasan agama yang marak terjadi belakangan ini. Hari-hari ini kita mudah lupa pada sejarah akbar yang membawa pada lahirnya Pancasila.

Bagaimanakah caranya hidup dalam Pancasila? Bagaimana caranya menghidupi Pancasila, menghidupi Indonesia merdeka? Cara itu adalah dengan menghidupinya sebagai suatu kesatuan. Kita tidak boleh memperlakukan tiap-tiap sila dalam Pancasila sebagai bagian-bagian yang terpisah-pisah dan berdiri sendiri-sendiri. Kita tidak boleh memprioritaskan salah satu sila dengan mengecilkan sila-sila yang lain. Kita tidak boleh membiarkan pencaplokan satu sila terhadap sila-sila yang lain. Kelima sila dalam Pancasila adalah suatu kesatuan dan sudah semestinya dihidupi sebagai suatu kesatuan.

Dalam pidato 1 Juni, Bung Karno menyebutkan satu hal yang mengikat kelima sila dalam Pancasila, satu prinsip paling dasar dari kelima prinsip dasar, satu intisari dari kelima intisari sejarah pergerakan rakyat Indonesia menuju kemerdekaan. Itulah Ekasila yang menjadi roh Pancasila 1 Juni 1945. Itulah gotong royong.

Indonesia merdeka hanya akan langgeng kalau semua golongan menjalankan “pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-binantu bersama”. Gotong royong ini jugalah yang mengatur hubungan antara kelima sila dalam Pancasila. Harus ada gotong royong di antara unsur-unsur yang religius, yang humanis, yang nasionalis, yang demokratis dan yang mengutamakan keadilan sosial. Semua unsur itu mesti duduk sama rendah berdiri sama tinggi, bahu-membahu memenangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Menghidupi Pancasila berarti menghidupi kelima sila sebagai suatu kesatuan tak terpisahkan yang diresapi oleh gotong royong.

Tapi gotong royong itu sendiri bisa terwujud karena berlakunya kelima sila itu dalam kehidupan kenegaraan bangsa Indonesia. Kenapa orang harus gotong royong? Pertama-tama, karena ada dasar spiritual dan keagamaan untuk saling bantu, tolong-menolong. Tidak ada agama atau keyakinan spiritual di dunia ini yang tidak mengarahkan agar setiap orang bersolidaritas

akan nasib orang lain. Gotong royong itu terjadi karena kita makhluk yang berketuhanan.

Kedua, kita bersikap gotong royong karena kita akui adanya persaudaraan antar manusia, lintas bangsa dan kita hargai hak asasi setiap orang. Negara kita didirikan bukan hanya atas dasar kebangsaan, tetapi juga atas pengakuan pada persaudaraan antar bangsa, pada internasionalisme. Tanpa pengakuan itu, kita akan terjatuh ke dalam nasionalisme yang sempit. Oleh karena kita mengakui persaudaraan antar bangsa maka kita siap sedia melakukan gotong royong untuk memajukan nasib umat manusia. Gotong royong itu terjadi karena kehidupan kenegaraan kita didasarkan atas prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.

Ketiga, kita bersikap gotong royong karena kita menjunjung tinggi persatuan kebangsaan. Kolonialisme telah membuat bangsa Indonesia tercerai-berai, tersekat-sekat ke dalam kelompok-kelompok, sehingga melanggengkan penjajahan itu sendiri. Oleh karenanya, bangsa Indonesia yang merdeka mesti mengedepankan semangat persatuan yang aktif, saling membantu dan bekerjasama. Gotong royong itu terjadi karena kita tidak mau dipecah belah dalam kehidupan kenegaraan kita.

Keempat, kita bersikap gotong royong karena kita percaya pada demokrasi. Kita mesti setia pada proses demokrasi. Kesetiaan ini tidak boleh diartikan sebagai sikap pasif terhadap demokrasi, apalagi sikap acuh tak acuh pada hasil-hasil demokrasi. Kesetiaan kita mesti diterjemahkan ke dalam keterlibatan aktif untuk terus mengawal jalannya demokrasi. Gotong royong pun terjadi karena kita setia pada prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.

Terakhir, kita bersikap gotong royong karena kita mencita-citakan terselenggaranya tatanan masyarakat yang adil dan makmur. Kehidupan kenegaraan kita digerakkan oleh visi tentang masyarakat yang merdeka dari segala bentuk penindasan manusia oleh manusia. Gotong royong dapat terwujud karena visi keadilan sosial itu begitu kuat menarik kita ke masa depan.

Dengan memandang kesatuan tak terpisahkan dari kelima sila dalam Pancasila seperti itulah kita menjalankan kehidupan bernegara berdasarkan Pancasila yang seutuh-utuhnya. Tiap-tiap sila hanya dapat dimaknai secara tepat apabila dihubungkan dengan setiap sila yang lain. Dan tiap-tiap sila hanya dapat diwujudkan-nyatakan melalui gotong royong seluruh bangsa Indonesia.

Maraknya kasus intoleransi, ujaran kebencian dan sentimen SARA di masyarakat dewasa ini membuktikan adanya kebutuhan mendesak bagi pemaknaan dan pelaksanaan Pancasila secara utuh dan menyeluruh. Semua itu adalah sekaligus juga bukti bahwa Pancasila teramat penting untuk ditegakkan sebagai asas hidup bernegara. Semua cobaan itu membuktikan bahwa usaha untuk memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia atas dasar Pancasila sama sekali tidak sia-sia, malah harus semakin digencarkan lagi. Tanpa Pancasila, tidak ada negara Indonesia merdeka.

Pancasila ibarat bumi yang subur tempat bertumbuhnya aneka ragam suara dan tindakan yang diikat oleh cita-cita kebangsaan yang sama, cita-cita Indonesia merdeka sebagai daya usaha bersama.

Sebagai dasar negara, Pancasila itu tidak tergoyahkan. Kita tidak bisa mempertanyakan Pancasila tanpa mempertanyakan keseluruhan bangunan negara Indonesia merdeka yang berdiri di atasnya. Menggugat Pancasila sama artinya dengan menggugat keberadaan negara Indonesia merdeka. Sebagai permufakatan kebangsaan yang melandasi pendirian negara Indonesia, Pancasila tidak bisa diganggu-gugat tanpa mengganggu-gugat bangsa Indonesia seluruhnya.

Berhadapan dengan Pancasila berarti berhadapan dengan seluruh bangsa Indonesia.

Seperti dalam lirik lagu Sudharnoto, kita semua adalah “patriot proklamasi”. Kita percaya pada cita-cita Revolusi Agustus, pada usaha besar mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kita

setia pada Pancasila sebagai dasar negara. Kesetiaan semacam ini pernah tersurat juga dalam sajak penyair besar kita, Chairil Anwar, berjudul *Persetujuan dengan Bung Karno*:

Ayo ! Bung Karno kasi tangan mari kita bikin janji
Aku sudah cukup lama dengan bicaramu
dipanggang diatas apimu, digarami lautmu
Dari mulai tgl. 17 Agustus 1945
Aku melangkah ke depan berada rapat di sisimu
Aku sekarang api aku sekarang laut

Bung Karno ! Kau dan aku satu zat satu urat
Di zatmu di zatku kapal-kapal kita berlayar
Di uratmu di uratku kapal-kapal kita bertolak & berlabuh

Dalam sajak ringkas itu, kita saksikan tangan yang terkepal memegang erat cita-cita kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Berapa orang yang telah gugur mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan dasar negara Pancasila? Antara proklamasi 1945 sampai dengan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada 1949, terbentanglelah suatu periode Revolusi Fisik. Saat itu, pasukan Belanda dan sekutunya menyerbu Indonesia, mencoba membatalkan proklamasi kemerdekaan dan mencaplok Indonesia kembali menjadi negara jajahan Belanda. Menghadapi itu, terjunlah berjuta-juta laskar rakyat berperang melawan kekuatan penjajah. Yang gugur selama periode itu tak kurang dari 100.000 jiwa.

Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan Agresi Militer kedua dengan menyerbu Yogyakarta, yang pada saat itu menjadi ibukota Republik Indonesia. Dalam penyerbuan itu, bandara Maguwo direbut, Yogyakarta jatuh, Bung Karno dan Bung Hatta ditangkap. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dibentuk. Inilah masa-masa genting yang bisa saja membatalkan proklamasi kemerdekaan dan Pancasila. Catatan sejarah tentang hari-hari genting ini tak terlalu banyak. Tapi kita punya laporan

pandangan mata dalam bentuk sebuah sajak yang ditulis seorang penyair kurus bernama Rivai Apin. Judulnya *Dari Dunia Belum Sudah*:

Pagi itu aku dengar beritanya,
Aku ke jalan
Orang-orang jualan dan hendak pergi kerja menepi-nepi
Oto-oto kencang, berat dengan serdadu-serdadu dan tank-tank
tak dapat digolakkan
Ada yang meronda, berdua-dua dan bersenjata
Di antaranya ruang lapan-lapan, tapi ada isi!
Semua beku padu:
Manusia benda dan udara, tapi memperlihatkan harga.

Aku pergi ke teman-teman berbicara, isi mengendap ke kelam
Berita: Jogja sudah jatuh, Maguwo... Karno tertangkap
Hatta, Sjahrir...
Kami terus berbicara, atau ke teman, ke teman dan ke teman
....
Kami berbicara, menimbang dan melihat kemungkinan
Semua dari satu kata dan untuk satu kata.

Senja itu aku pulang, sarat dengan berita dan kemungkinan,
Di rumahku aku disambut oleh keakuanku yang belum sudah:
buku yang terbuka, yang belum dibaca dan buku yang harus
aku sudahkan,
Tapi untuk ini aku sudah tinggalkan Bapa dan Abang
Dan baru pula teringat ini hari baru satu kali makan.
—yang periuknya selalu terbuka— Dan aku sudahkan
keakuanku
di dalam ruang kuburan yang digalikan oleh nyala pelita di
dalam kegelapan.

Tapi malam itu menghentam, sepatu lares pada dinding
kegelapan yang tebal
Dan ketika mereka telah pergi terdengar ratap perempuan,

bininya atau ibunya.

Padaku tak usah lagi diceritakan, bahwa ada yang dibawa
Aku hanya bisa menekankan kepala pada papan meja,
Buncah oleh itu kata yang belum punya bumi tapi telah
mengejar

pula ke dalam dunia yang belum sudah.

Tergambar bagaimana suasana begitu darurat pada masa itu. Bung Karno ditangkap, masa depan Republik tak menentu, kegelisahan sudah sampai leher. Namun laskar rakyat dan tentara bahu-membahu menggencarkan perang gerilya di mana-mana. Semua bangsa percaya bahwa kemerdekaan harus dibela, Pancasila harus diperjuangkan. Maka gugurlah mereka, tak kurang dari 100.000 jiwa, demi negara Indonesia merdeka dan Pancasila sebagai dasarnya.

Maka sekarang bukan waktunya lagi membahas tepat atau tidaknya permufakatan kebangsaan kita, bertanya-tanya soal tepat-tidaknya Pancasila, melainkan menagih kesetiaan kita pada permufakatan itu. Sekarang sudah bukan waktunya bertanya-tanya apakah Pancasila relevan atau tidak. 100.000 jiwa sudah gugur selama Revolusi Fisik 1945-1949—100.000 jiwa yang terdiri dari tentara, laskar, pemuda, rakyat jelata, laki-laki dan perempuan, dari beragam etnis dan agama. Mereka gugur di atas bumi dan di bawah langitnya Pancasila 1 Juni 1945. Sekarang sudah bukan waktunya bertanya-tanya apakah kematian 100.000 rakyat itu punya arti. Sekarang adalah waktunya menghidupi janji kita pada yang mati, bersetia pada permufakatan kebangsaan kita, Pancasila!

Lampiran 1. Denah Tempat Duduk Selama Persidangan BPUPKI

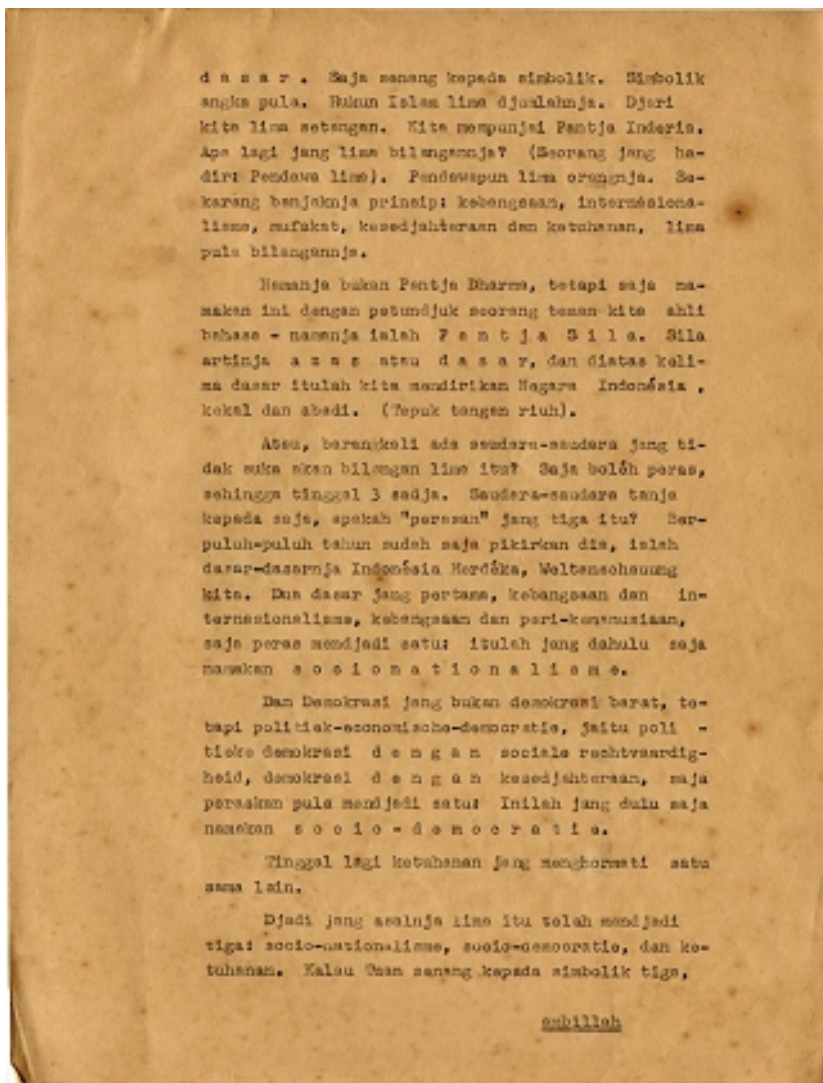
Ak. 2009
No. 4645

獨立準備委員會議事表 Peta tempat duduk persidangan Badan Penyelidik Oesaha' Persiapan Kemerdekaan.																																																																																																										
60	Mr. Kusnanto	Mr. Soediro	58	Mr. A. M. Mardiana	57	Dr. Santia	56	Abdul Kadir	55	A. Roeslan	48	Mr. K. R. M. A. Sirepudin	47	H. H. M. N. M. A. Sirepudin	46	Mr. K. R. M. A. Sirepudin	45	Mr. K. R. M. A. Sirepudin	44	Mr. K. R. M. A. Sirepudin	43	Mr. K. R. M. A. Sirepudin	42	Mr. K. R. M. A. Sirepudin	41	Mr. K. R. M. A. Sirepudin	40	Mr. K. R. M. A. Sirepudin	39	Mr. K. R. M. A. Sirepudin	38	Mr. K. R. M. A. Sirepudin	37	Mr. K. R. M. A. Sirepudin	36	Mr. K. R. M. A. Sirepudin	35	Mr. K. R. M. A. Sirepudin	34	Mr. K. R. M. A. Sirepudin	33	Mr. K. R. M. A. Sirepudin	32	Mr. K. R. M. A. Sirepudin	31	Mr. K. R. M. A. Sirepudin	30	Mr. K. R. M. A. Sirepudin	29	Mr. K. R. M. A. Sirepudin	28	Mr. K. R. M. A. Sirepudin	27	Mr. K. R. M. A. Sirepudin	26	Mr. K. R. M. A. Sirepudin	25	Mr. K. R. M. A. Sirepudin	24	Mr. K. R. M. A. Sirepudin	23	Mr. K. R. M. A. Sirepudin	22	Mr. K. R. M. A. Sirepudin	21	Mr. K. R. M. A. Sirepudin	20	Mr. K. R. M. A. Sirepudin	19	Mr. K. R. M. A. Sirepudin	18	Mr. K. R. M. A. Sirepudin	17	Mr. K. R. M. A. Sirepudin	16	Mr. K. R. M. A. Sirepudin	15	Mr. K. R. M. A. Sirepudin	14	Mr. K. R. M. A. Sirepudin	13	Mr. K. R. M. A. Sirepudin	12	Mr. K. R. M. A. Sirepudin	11	Mr. K. R. M. A. Sirepudin	10	Mr. K. R. M. A. Sirepudin	9	Mr. K. R. M. A. Sirepudin	8	Mr. K. R. M. A. Sirepudin	7	Mr. K. R. M. A. Sirepudin	6	Mr. K. R. M. A. Sirepudin	5	Mr. K. R. M. A. Sirepudin	4	Mr. K. R. M. A. Sirepudin	3	Mr. K. R. M. A. Sirepudin	2	Mr. K. R. M. A. Sirepudin	1	Mr. K. R. M. A. Sirepudin

Kotora mada Dr. K. R. T. Hadiman Wedodintoyat	Kotora Ithangas Yoso	Kotora mada H. P. Soero
--	-------------------------	----------------------------

(Sumber: ANRI)

Lampiran 2. Transkripsi Pidato Soekarno pada Sidang BPUPKI 1 Juni 1945 yang Menyebutkan soal Pancasila



(Sumber: ANRI)

Lampiran 3. Notulensi Pengesahan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Sidang PPKI 18 Agustus 1945

- 8 -

ANGGOTA OTTO ISKANDAR DINATA:

Kalimat kedua: "pintu gerbang". Itu tidak ada
Djadi baiklah diganti dengan kata-kata: "ke-Negara Indonesia".

KERTUA:

"Mengantarkan rakjat Indonesia ke-Negara Indonesia, tidak "kedepan pintu gerbang"? Saja kira tidak berkeberatan dengan adanya perkataan "pintu gerbang", sebab Negara Indonesia belum ada.

BATAS SIMKOTOYO:

Rakjat kita antarkan kemuka pintu gerbang saja. Kalau ke-Negara Indonesia, kita selangkah kepada grandwet. Itu bedanja. Sekarang kita bawa rakjat kemuka "pintu gerbang saja.

KERTUA I

Tuan Oto telah mufakat.
Tuan-tuan tidak ada lagi perotahan ?
Silahkan tuan Gusti.

ANGGOTA I GUSTI KERTU BUJJA:

Ajat 3: "Atas berkat Rahmat Allah" diganti dengan "Tuhan" saja, "Tuhan Jang Maha Kuasa".

KERTUA:

Ditawulkan supaya perkataan "Allah diganti dengan Esa" diganti dengan "Tuhan Jang Maha Esa".

Tuan-tuan semua mufakat: perkataan "Allah diganti Batas berkat Tuhan Jang Maha Kuasa". Tidak ada lagi, tuan-tuan ?

Kalau tidak ada, sekali lagi saja batja seluruhnja, maka kemudian saja sahkan.

P E M B U K A A N.

"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-kendilan.

Dan perjuangn pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan Rakjat Indonesia ke-depan pintu gerbang negara Indonesia, yang merdeka, berseutu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Tuhan Jang Mahas Kuasa, dan dengan didorongkan oleh ke-inginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka Rakjat Indonesia menjatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat, dengan berdasarkan kepada: ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan Kerakjatan yang dipimpin oleh hikmat-kebijaksanaan dalam permusjawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakjat Indonesia".

Setudja tuam? ?

(suara: Setudja.)

Dengan ini sahlah pembentukan Undang-undang dasar negara Indonesia.

Sekarang tuam2, saya bitjarkan undang-undang dasar.

Perubahan-perubahan yang diberitahukan oleh P.T. Sisukyo-kutyoo tuam-tuan telah mengetahui.

Lebih dulu saya mengedakan pemandangan umum (global), atas undang-undang dasar ini, tetapi tuam-tuan saja minta singkat. Djikalau sudah ada pemandangan umum? Tuam-tuan mendapat penerangan sedikit tentang opsetnja, opsetnja Undang-undang dasar ini. Djikalau perlu tuam Mr. Supomo untuk memberi penjelasan. Perlu, tuam-tuan Mr. Supomo saja peralihkan memberi penjelasan tentang opsetnja.

ANGGOTA SUPOMO :

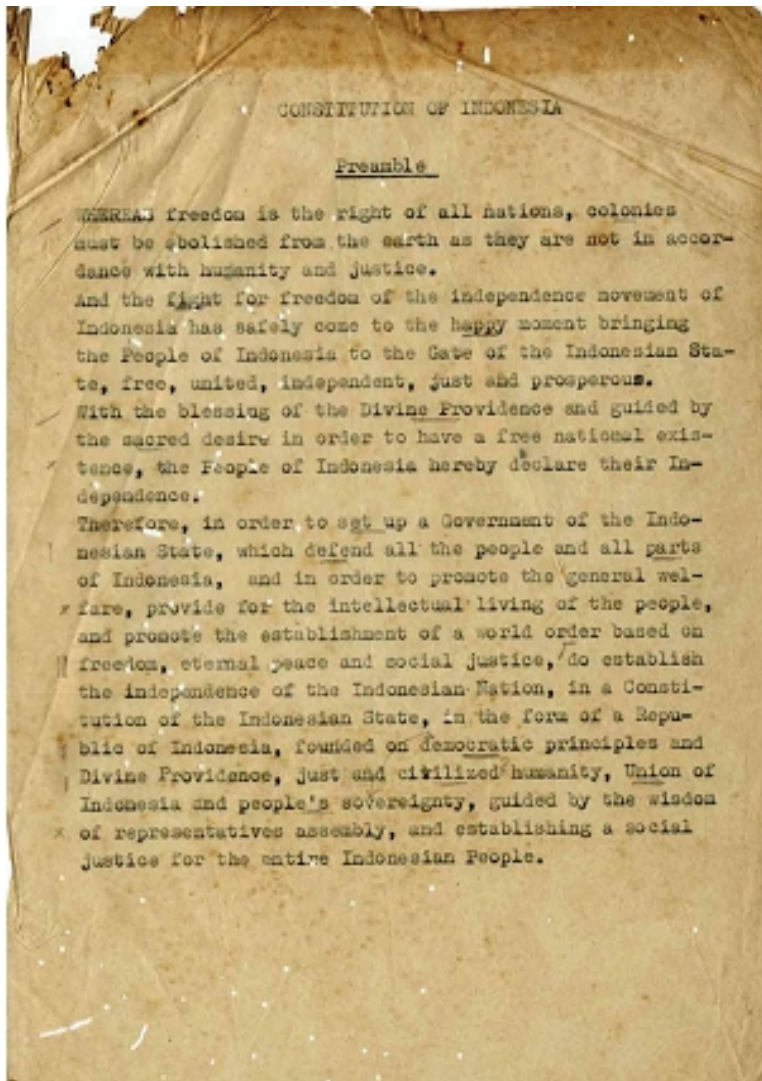
Pikiran tentang undang-undang dasar, tentang susunan negara, ialah begini. Kedaulatan negara ditangan rakjat, sebagai pendjelman rakjat, jaitu diadakan satu badan - yang dinamakan disini: Madjelis Permusjawaratan Rakjat suatu badan negara yang memegang kedaulatan Rakjat, djadi suatu badan yang paling tinggi yang berkuasa tidak terbatas.

Maka Madjelis Permusjawaratan Rakjat yang tadi memegang kedaulatan rakjat. itu yang menetapkan undang-undang dasar dan Madjelis Permusjawaratan Rakjat itu yang mengangkat presiden dan wakil presiden.

Maka Madjelis Permusjawaratan Rakjat menetapkan garis-garis besar balaun negara. Maka Presiden dan Wakil Presiden itu djadi diangkat oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat, itu dibawah Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Djadi Presiden "unterge-ordnet" tidak "nebeneordnet", tetapi dibawahnya Madjelis

Permusjawaratan

Lampiran 4. Rancangan Naskah Terjemahan Inggris Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945



(Sumber: ANRI)

Lampiran 5. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945*

Pada pukul 10.00 pagi tampillah Ir. Soekarno didampingi oleh Drs. Mohammad Hatta di muka serambi rumah Pegangsaan Timur 56.

Suasana menjadi sunyi.

Akhirnya terdengarlah suara Bung Karno yang mengucapkan pidato yang bersejarah sebagai berikut:

“Saya telah minta Saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun!

Gelombang aksi untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya, tapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita.

Juga di dalam zaman Jepang usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang kita tampaknya saja menyandarkan diri kepada mereka.

Tetapi pada hakekatnya, tetap kita menyusun tenaga sendiri, tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan tanah air di dalam tangan kita sendiri.

Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri, akan dapat berdiri dengan kuatnya.

Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat, bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita.

* Dikutip dari Saafroedin Bahar, et.al., *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995, h. 407-409.

Saudara-saudara! Dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu.

Dengarlah Proklamasi kami:

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia.

Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dll., diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05

Atas nama bangsa Indonesia.

Soekarno/Hatta.

Demikianlah Saudara-saudara!

Kita sekarang telah merdeka! Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita!

Mulai saat ini kita menyusun negara kita: Negara Merdeka, Negara Republik Indonesia. Merdeka kekal dan abadi.

Insy Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu.”

Lampiran 6. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



“Saudara-saudara! Dasar-dasar Negara telah saya usulkan. Lima bilangannya. Inikah Panca Dharma? Bukan! Nama Panca Dharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam lima jumlahnya. Jari kita lima setangan. Kita mempunyai Panca Indra. Apa lagi yang lima bilangannya? Pandawa pun lima orangnya. Sekarang banyaknya prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, lima pula bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa—namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi.”

—Soekarno, 1 Juni 1945



Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
2017